

'BPK tak Ingin Jadi Gudang Rekomendasi'

Hal 4

Daerah Peraih WTP Meningkatkan

Hal 16

BPK-BOA Japan Berbagi Ilmu Manajemen SDM

Hal 21



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 mengamanatkan, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

TINDAK LANJUT

Rekomendasi BPK



- 3 Dari Redaksi
- 4 'BPK tak Ingin Jadi Gudang Rekomendasi'
- 6 WTP Saja tak Cukup
- 8 Profesionalisme BPK Diapresiasi
- 10 SAP Berbasis Akrual Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan
- 14 Masih Ada Temuan Berulang
- 16 Daerah Peraih WTP Meningkatkan
- 20 BPK Hadiri Pertemuan ke-11 INTOSAI KSC Steering Committee
- 21 BPK-BOA Japan Berbagi Ilmu Manajemen SDM
- 22 Syamsudin, Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Pemeriksa adalah Profesi Mulia

- 27 Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara Rekomendasi BPK Jadi Kunci
- 30 Prof Dr Gagaring Pagalung, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Pemda Makin Termotivasi Meraih WTP
- 32 Solowi Resto, Konsisten dalam Rasa dan Kualitas
- 34 Kepedulian Sosial Ikatan Istri Anggota BPK
- 36 BPK Mulai Terapkan Konsep *Green Building*
- 39 Menjaga Hubungan Baik dengan Media Massa
- 40 BPK Bersiap Lakukan Pemeriksaan Pendahuluan PFM
- 42 Standar Kompetensi Jabatan ASN
- 48 Berita Foto





Setelah sebelumnya mengulas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2018, *Warta Pemeriksa* pada edisi Juli ini mengangkat tema seputar Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Seperti diketahui, LKPP 2018 yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan laporan keuangan konsolidasian dari 86 LKKL dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Artikel-artikel yang kami sajikan pada edisi kali ini tak hanya bertujuan memberikan informasi, tapi juga diharapkan dapat menjadi pemompa semangat para entitas untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan.

Melalui rubrik Sorotan, *Warta Pemeriksa* menyajikan tulisan terkait pesan-pesan dari para Anggota BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKKL. Anggota III BPK Achsanul Qosasi, misalnya, mengingatkan kepada para entitas untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia juga memberikan sejumlah saran agar rekomendasi hasil pemeriksaan tak menjadi beban bagi para pimpinan K/L.

Sementara, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, komitmen entitas mewujudkan akuntabilitas tak hanya diukur dari capaian opini atas laporan keuangan. Hal yang tak kalah penting adalah komitmen dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi.

Pada rubrik BPK Bekerja, diulas mengenai hasil pemeriksaan LKKL secara umum yang berada di bawah lingkup pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara VI. Kami juga menyajikan tulisan mengenai perkembangan capaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018.

Untuk melengkapi pembahasan, pada rubrik Sudut Pandang, kami menampilkan hasil wawancara dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang berhasil membawa Pemprov Sulut mempertahankan opini WTP. Ia menjelaskan dengan cukup terperinci mengenai kebijakan dan program yang diterapkan dalam meraih opini WTP.

Masih banyak lagi informasi menarik dan bermanfaat yang kami sajikan dalam rubrik-rubrik lain pada edisi ini. Kami juga tetap menantikan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan mengenai tugas pokok BPK dan topik lain yang menarik. ●

Tim Editorial

Pengarah

Moermahadi Soerja Djanegara
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Juska Meidy Enyke Sjam

Supervisi Penerbitan

Gunarwanto

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Redaksi

Bidramnanta
Iqra Fiqh
Yudha Bayangkara
Radiansyah Said
Arif Rahman Hakim
Ren Jingga

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Reza Hadi Satria
Ridha Sukma
Sudarman

Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia



■ Anggota III BPK, Achsanul Qosasi

'BPK tak Ingin Jadi Gudang Rekomendasi'

BPK menegaskan akan membantu kementerian dan lembaga yang ingin menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan seluruh Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi hasil pemerik-

saan yang ada di LHP wajib ditindaklanjuti.

Beleid tersebut juga mengatur bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi saat penyerahan LHP atas LKKL Tahun Anggaran 2018 kepada 38 K/L di ling-

kungan pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III, di Auditorium BPK, Jakarta, Senin (17/6), mengatakan, BPK sangat menaruh perhatian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

"BPK tidak ingin jadi gudang rekomendasi. Oleh karena itu, begitu rekomendasi kami keluarkan, kami melakukan pemantauan dan memberikan jalan penyelesaiannya seperti apa.

Saya menekankan kepada tim saya agar jangan hanya pintar menemukan permasalahan, tapi juga harus pintar memberikan solusi," kata Achsanul di depan para pimpinan kementerian dan lembaga yang hadir.

Pria kelahiran Sumenep, Jawa Timur tersebut mengingatkan kepada pimpinan K/L untuk mengirim surat ke BPK jika ada rekomendasi yang bertahun-tahun tidak bisa ditindaklanjuti atau sudah tidak mungkin ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut akan dimasukkan oleh BPK ke dalam temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan begitu, status tindak lanjut rekomendasi dianggap selesai.

"Ini penting karena jika tindak lanjut rekomendasi tidak bapak segera selesaikan, BPK berkewajiban menyampaikannya kepada aparat penegak hukum. Meski begitu, saya tidak akan pernah memberikan suatu rekomendasi yang tidak bisa diselesaikan," ujar dia.

Ia sangat bersyukur karena respons entitas pemeriksaan di bawah AKN III untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan cukup bagus. Dari 20.269 rekomendasi yang dikeluarkan hingga semester II 2018, sebanyak 49 persen rekomendasi selesai ditindaklanjuti. Yang belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 21 persen. Sedangkan jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 30 persen.

Achsanul memerinci, sebanyak 18 K/L memiliki tingkat tindak lanjut rekomendasi sebesar 50 persen, 9 K/L sebesar 40 persen, dan 4 K/L masih di bawah 30 persen. Beberapa K/L yang memiliki tindak lanjut tertinggi adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Kominfo, Kementerian PAN-RB, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Ristek Dikti.

"BPK akan membantu K/L untuk menindaklanjuti rekomendasi. Silakan datang ke BPK, BPK pasti membantu. Saya sudah perintahkan tim saya jika ada yang mau menindaklanjuti harus dibantu," kata Achsanul.

Hasil Pantauan terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang Diterbitkan 2005-2018



Terkait laporan keuangan, Achsanul mengapresiasi K/L yang dinilai telah mengalami perbaikan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Sebab, tidak ada LKKL Tahun Anggaran 2018 di lingkungan pemeriksaan AKN III yang meraih opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*).

"Jumlah peraih opini WTP naik dari 34 K/L pada 2017 menjadi 37 K/L pada 2018. WDP berkurang dari empat K/L menjadi tinggal satu K/L. Yang meraih TMP nihil," ujar dia.

Ia semakin mengapresiasi karena jumlah nilai temuan pemeriksaan mengalami penurunan. Nilai temuan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada 2018 tercatat sebesar Rp435 miliar. Jumlah itu sangat jauh lebih rendah dibandingkan nilai temuan pada 2017 yang mencapai Rp5,8 triliun.

Nilai temuan terkait kepatuhan juga berkurang dari Rp802,48 miliar pada 2017 menjadi Rp638,18 miliar pada 2018. "Persentase nilai temuan terkait kepatuhan yang telah ditindaklanjuti naik dari 4,80 persen pada 2017 menjadi 19,96 persen pada 2018," ujar dia.

Auditor Utama Keuangan Negara III Blucer W Rajagukguk menjelaskan, tujuan utama pemeriksaan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai

(*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Guna mendukung pemeriksaan yang berintegritas, independen, dan profesional, BPK menerapkan prinsip-prinsip dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP). Penerapan SPKN dan PMP yang dilakukan oleh BPK dalam rangka meningkatkan *quality control* dan *quality assurance*.

"Pedoman ini merupakan acuan bagi pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK benar-benar berkualitas dan memberikan dampak positif terhadap perbaikan kinerja pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," ujar Blucer.

Blucer menyampaikan, pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga dilakukan dalam empat tahap yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan *field work* (pekerjaan lapangan) pemeriksaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, dan terakhir pelaksanaan penyerahan laporan hasil pemeriksaan. ●

WTP Saja tak Cukup



■ Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna

Komitmen entitas mewujudkan akuntabilitas tak hanya diukur dari opini laporan keuangan, tapi juga melalui komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan tak berhenti setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan entitas diserahkan. BPK akan terus bekerja hingga entitas menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan.

Hal tersebut ditegaskan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna saat menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I, di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta, Kamis (20/6). Agung menyerahkan LHP kepada 14 entitas dari 20 entitas yang berada di bawah AKN I. LHP yang diserahkan meliputi LKKL Kemenko

Polhukam, BIN, Lemhannas, Wantannas, BNPT, Bakamla, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, BNN, Basarnas, KPU, Bawaslu, dan BMKG.

Sebanyak 17 entitas di bawah AKN I meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sisanya, 2 entitas meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 entitas mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Agung dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada entitas yang telah berhasil mencapai opini WTP. Ia berharap entitas yang belum meraih WTP dapat terus berusaha meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan negara.

Meski demikian, kata Agung, komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tak hanya diukur dari opini atas laporan keuangan yang diraih. "Hal

yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan," kata Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Agung memaparkan mengenai hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK pada 20 entitas untuk periode 2005 sampai dengan semester II Tahun 2018. Ia memerinci, terdapat 8.735 temuan senilai Rp47,74 triliun dan 17.958 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp8,03 triliun.

Dari jumlah tersebut, ujar Agung, sebanyak 14.477 rekomendasi atau 80,61 persen dari total rekomendasi senilai Rp5,19 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. "Angka 80,61 persen ini di atas rata-rata tindak lanjut

yang dilakukan oleh seluruh entitas di Indonesia yang baru berkisar 75,30 persen,” kata Agung.

Adapun sebanyak 2.167 rekomendasi atau 12,07 persen telah ditindaklanjuti, namun belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut senilai Rp2,50 triliun. Kemudian, sebanyak 1.262 rekomendasi atau 7,03 persen dari total rekomendasi belum ditindaklanjuti senilai Rp82,31 miliar. Sedangkan sebanyak 52 rekomendasi atau 0,29 persen dari total rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dengan nilai Rp266,46 miliar.

Terkait tindak lanjut, Agung mengingatkan bahwa sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan pengganti Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi. Dengan penerapan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut, seluruh entitas di lingkungan AKN I diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan mudah dan cepat. “Karena berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti,” dia menegaskan.

Agung menambahkan, meskipun secara umum pengelolaan keuangan negara mengalami perbaikan, penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual tidak boleh hanya dipahami sebagai perubahan format pelaporan

keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada entitas terperiksa di lingkungan AKN I, terdapat setidaknya 12 jenis temuan signifikan, baik yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. “Ini penting untuk menjadi perhatian,” kata dia.

Lima temuan yang disebabkan oleh kelemahan SPI yaitu lemahnya penatausahaan dan pengendalian kas, peraturan persediaan belum memadai, pengelolaan dan pengamanan barang milik Negara belum sesuai ketentuan, dan pengelolaan belanja pegawai belum memadai.

Selain itu, terdapat tujuh temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain, kelebihan pembayaran atas pekerjaan sewa komunikasi internet, pemilihan sistem, perjalanan dinas, dan honorarium yang tidak sesuai ketentuan.

“BPK mengharapkan agar kementerian/lembaga dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Agung.

Agung mengatakan, opini WTP yang diraih pada tahun ini bukan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga perlu terus mengupayakan peningkatan akuntabilitas.

Agung menjelaskan, sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif pada seluruh tahapan proses manajemen atau pengelolaan keuangan negara sejak dari perumusan kebi-

jakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, sampai pada monitoring dan evaluasi, sangat diperlukan guna mendukung akuntabilitas keuangan dan kinerja, sehingga tertib administrasi dan opini LK yang baik dapat tercapai. “Dan jika semuanya tercapai, maka pada akhirnya *good and clean governance* akan dapat diwujudkan,” ungkap Agung.

Salah satu entitas peraih opini WTP di lingkungan AKN I adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksana mengatakan, opini WTP yang diraih tak lepas dari baiknya sinergi dan kerja sama dengan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Teddy beserta semua jajaran mengaku telah berupaya semaksimal mungkin mengelola anggaran.

“Anggaran dan dana telah digunakan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan telah dikelola dengan hadirnya sistem pengendalian internal yang memadai,” kata dia.

Ia menyadari bahwa capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara. WTP juga harus disertai perbaikan secara menyeluruh mulai dari membudayakan disiplin kinerja, tata tertib kerja, dan berpegang pada etika, norma, dan peraturan yang berlaku.

“Dengan demikian kita semua akan dapat berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas kerja kementerian dan lembaga menuju arah yang lebih baik,” katanya. ●

Saran BPK untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

1

Memperkuat Sistem Pengendalian Intern dan memperkuat *three line of defence* dalam pengelolaan keuangan negara.

2

Rekrutmen, penguasaan dan pembinaan SDM yang kompeten, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.

3

Keterlibatan Kuasa Pengguna Anggaran yang aktif dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik.

4

Menerapkan sistem *reward and punishment* yang efektif untuk mendukung integritas dan profesionalisme yang andal dan memadai.

5

Memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Profesionalisme BPK Diapresiasi

Meningkatnya jumlah kementerian dan lembaga yang meraih opini WTP tak terlepas dari peran BPK dalam membantu entitas menyelesaikan permasalahan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara sangat mengapresiasi profesionalisme Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan. Menurut Rudiantara, BPK dalam memeriksa tak lagi berorientasi menemukan permasalahan, melainkan membantu entitas memperbaiki permasalahan sehingga

tata kelola keuangan kementerian dan lembaga semakin bagus.

Sikap BPK itu pula yang menurut Rudiantara telah membuat laporan keuangan Kominfo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Ia masih ingat betul, Kominfo sempat meraih opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer* dari BPK saat ia pertama kali menjadi Menkominfo.

“Pada awal saya masuk di Kominfo,

pertama (mendapatkan opini) *disclaimer*. Kemudian naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan akhirnya WTP tiga kali berturut-turut,” kata Rudiantara saat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) di lingkup pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III yang dihelat di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (17/6).



■ Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara

kominfo.go.id



■ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin

suara.com

Rudiantara menilai, meraih opini WTP atas laporan keuangan bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban bagi kementerian dan lembaga.

“WTP saat itu memang dianggap sebagai prestasi. Tapi kami bicara kepada teman-teman, WTP seharusnya bukan sebuah prestasi, tapi adalah kewajiban untuk menjadi penyelenggara pemerintahan yang baik,” kata dia.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang telah bekerja sama dengan pemerintah, termasuk Kominfo sehingga membuat Kominfo bisa ‘naik kelas’ menjadi peraih opini WTP.

“Ada beberapa perubahan yang kami rasakan. Sikap dari BPK itu tidak lagi ‘nah lho’, tapi ‘eits!, eits!, eits!’. Kalau ‘nah lho’ itu kan seperti orang berdiri di depan atau setelah lampu *setopan*. Motor lewat tidak pake helm atau tidak lengkap surat-suratnya, ‘nah lho’ kena. Tapi sekarang sudah berdiri sebelum lampu *setopan*, jadi memberikan *warning*. Di situlah fungsi *advisory* dari auditor yang menurut saya kita harus tanda kutip manfaatkan,” ujar Rudiantara.

Ia menegaskan, para menteri dan kepala lembaga di periode pemerintahan saat ini berkomitmen untuk bekerja

”

BPK punya kontribusi besar. Sebab, BPK-lah yang menjadi konsultan pertama bagi pemerintah.

keras dalam meningkatkan tata kelola keuangan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK.

“Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada BPK yang senantiasa terus membantu pemerintah agar mendapat predikat WTP,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin melontarkan hal senada dengan Rudiantara. Syafruddin mengatakan, meningkatnya jumlah kementerian dan lembaga yang meraih opini WTP tak terlepas dari peran BPK dalam membantu entitas menyelesaikan permasalahan.

“BPK punya kontribusi besar. Sebab, BPK-lah yang menjadi konsultan pertama bagi pemerintah,” kata Syafruddin.

Seperti diketahui, ada 81 LKKL dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (95 persen) yang mendapatkan opini WTP pada 2018. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 79 LKKL dan 1 LKBUN (91 persen).

Sedangkan, 4 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 6 LKKL. Selain itu, masih terdapat 1 LKKL yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2017, yaitu 2 LKKL.

Syafruddin mengatakan, capaian tersebut bukan hanya harus dipertahankan, tapi juga ditingkatkan. “Sehingga, tidak ada lagi suatu institusi atau lembaga apapun yang permasalahannya tidak diselesaikan,” ujar dia.

Kemenpan-RB, kata dia, sangat berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Ia juga akan membangun inovasi-inovasi baru agar pekerjaan pemerintah menjadi lebih efisien. ●

SAP Berbasis Akruwal Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan laporan keuangan berbasis akrual memungkinkan kementerian dan lembaga untuk dapat menyajikan seluruh hak dan kewajiban dan kekayaannya, serta perubahan kekayaan hasil operasional serta realisasi anggarannya secara lebih komprehensif.

Anggota V BPK Isma Yatun mengatakan kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga mengalami peningkatan. Bahkan, Isma menilai peningkatan terjadi secara signifikan sejak 2015 atau tahun keempat implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual atau Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Hal tersebut disampaikan Isma saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan sejumlah lembaga serta badan lainnya di lingkungan pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V, di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Jumat (14/6).

Kualitas sebuah laporan keuangan merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pimpinan kementerian dan lembaga, kata Isma, semakin memahami dan menyadari betapa pentingnya kualitas laporan keuangan yang baik.

Isma menjelaskan, penerapan laporan keuangan berbasis akrual memungkinkan kementerian dan lembaga untuk dapat menyajikan seluruh hak dan kewajiban dan kekayaannya, serta perubahan kekayaan hasil operasi serta realisasi anggarannya secara lebih komprehensif.

“Dengan laporan keuangan berbasis akrual ini

pula, kementerian dan lembaga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara secara lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan,” kata Isma.

Sejalan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan tersebut, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tidak menemukan permasalahan signifikan yang secara material dapat mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan kementerian dan lembaga lainnya di lingkungan AKN V. Atas dasar itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP tahun 2018 kepada Kementerian Agama, Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengembang Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Dengan demikian seluruh entitas di lingkungan AKN V telah mampu meraih dan mempertahankan opini WTP yang telah diraih di tahun-tahun sebelumnya. BPK mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan entitas beserta jajarannya yang telah berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP,” ujar Isma.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pencapaian opini WTP bukan tujuan akhir pengelolaan keuangan negara. BPK sangat berharap pencapaian opini WTP disertai dengan peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing entitas.

Opini WTP atas ketujuh entitas di lingkungan AKN V, ujar Isma, merupakan hasil kerja keras dari seluruh kementerian dan lembaga lainnya, termasuk dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. “Prestasi ini diharapkan jadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transpa-



”

Prestasi ini diharapkan jadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada masing-masing kementerian dan lembaga serta badan lainnya, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

ransi pengelolaan keuangan pada masing-masing kementerian dan lembaga serta badan lainnya, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan,” Isma berpesan.

Dalam kesempatan tersebut, Isma turut me-

nyinggung soal fluktuasi opini kementerian dan lembaga pada tiga tahun terakhir. Kata dia, ada kementerian dan lembaga yang menurun kualitas opininya. Hal tersebut pada umumnya terjadi karena kementerian dan lembaga tidak sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau terdapat permasalahan-permasalahan terkait pada sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada tahun berjalan yang nilainya signifikan, sehingga berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Oleh karena itu, Isma mengingatkan entitas tidak menganggap sepele permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini. “Karena sekecil apapun permasalahan yang ada, bisa berkembang menjadi permasalahan yang signifikan di masa yang akan datang,” ujar dia.

Isma menyampaikan, ada beberapa permasalahan yang sebaiknya mendapatkan perhatian serius dari pimpinan pejabat dari kementerian, lembaga, dan badan. Tujuannya agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1

- Dari sisi pendapatan, BPK masih menemukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang kurang tertib dan tidak melalui mekanisme APBN, serta pemungutan PNBP yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, PNBP yang telah dipungut belum atau terlambat disetorkan ke kas negara, dan pengelolaan PNBP atas pemanfaatan aset yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai dan belum ditetapkan tarif PNBP-nya. Permasalahan ini terjadi terutama pada satker perguruan tinggi keagamaan negeri dan satker yang menyewakan atau melakukan kerja sama pemanfaatan barang milik negara.
- Dari sisi belanja, BPK masih menemukan penganggaran yang masih tidak sesuai dengan substansi kegiatannya, realisasi belanja yang tidak ada alokasi anggarannya, kelebihan pembayaran honorium, perjalanan dinas dan paket *meeting*, kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa, termasuk jasa konsultasi, kelebihan pembayaran belanja modal akibat pelaksanaan karena tidak sesuai dengan kontrak, penyaluran belanja program yang belum dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan, penyaluran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum memadai, dan pertanggungjawaban belanja yang tidak tertib.

2

Penatausahaan piutang dan persediaan yang kurang tertib sehingga penyajian piutang dan persediaan kurang akuntabel.

3

Pengelolaan dan pengamanan aset tetap yang kurang memadai, sehingga terdapat aset tetap barang milik negara yang masih dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak dan atau dalam sengketa.

BPK dalam proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan telah meminta tanggapan kepada masing-masing pejabat terkait atas konsep rekomendasi BPK, termasuk meminta dokumen rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga serta badan lainnya. Isma mengatakan, hal ini untuk memastikan komitmen dari kementerian dan lembaga serta lembaga lainnya dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu.

Sesuai amanat pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan terima kasih kepada BPK karena terus mengingatkan kementerannya untuk melakukan pengelolaan APBN secara akuntabel melalui pemeriksaan yang dilakukan secara ru-

tin. "Dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPK untuk perbaikan tata kelola keuangan di Kementerian Agama, kami semakin mawas diri dan selalu berupaya meningkatkan antisipasi atas kelemahan-kelemahan yang ada dengan melakukan langkah-langkah yang tepat," kata Lukman.

Terkait pengelolaan barang milik negara (BMN), khususnya terkait inventarisasi, Menag menegaskan sudah meminta Sekjen dan Irjen Kemenag untuk segera menginventarisasi BMN yang menghasilkan PNBP dan melakukan penelurusan aset.

Sementara, dalam kesempatan wawancara dengan wartawan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai rekomendasi BPK sangat bermanfaat untuk meningkatkan tata kelola keuangan. Berkat adanya masukan dari BPK, ujar dia, Kemendagri dan BNPP dalam empat tahun terakhir meraih opini WTP.

Tjahjo menegaskan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK. "Selama empat tahun ini kami konsisten. Apapun temuannya, sekecil apapun, apapun rekomendasinya, akan kami lakukan tindak lanjut," pungkasnya. ●

e-PPID

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

PERMINTAAN INFORMASI

Masyarakat

- ◆ Datang langsung ke PIK
- ◆ Via Telepon
- ◆ Via Fax
- ◆ Via PO BOX
- ◆ Website

Persyaratan

- ◆ Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
- ◆ Melampirkan:
 - Identitas diri (KTP)
 - Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
 - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Petugas PIK akan mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta, kemudian memproses Permintaan Pemohon Informasi

Bila persyaratan sudah lengkap

Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

Bila persyaratan belum lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

PENGADUAN

Masyarakat

- ◆ Datang langsung ke PIK
- ◆ Via Telepon
- ◆ Via Fax
- ◆ Via PO BOX
- ◆ Website

Verifikasi
Verifikasi identitas pelapor dan kelengkapan bukti oleh Petugas PIK

Pengaduan Lengkap

Pengaduan Tidak Lengkap

Bila persyaratan belum lengkap

Pengadu atau Pelapor akan diberikan surat pemberitahuan lewat pos atau email untuk melengkapi dokumen atau surat pemberitahuan tidak dapat ditindaklanjuti

Bila persyaratan lengkap

1. Petugas PIK memproses penyampaian pelaporan Pengaduan
2. Surat keluar PPID kepada Pengadu/Pelapor sebagai tanggapan

KEBERATAN ATAS INFORMASI

Pemohon

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID

Atasan PPID BPK RI harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai

Jika pengaju keberatan tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

➤ Pusat Informasi dan Komunikasi BPK

Alamat:
Jl. Gatot Subroto
Kav. 31, Jakarta
Pusat 10210

Website:
www.bpk.go.id

Telepon:
(021) 25549000
ext. 3912

Kotak Surat:
PO BOX 4300
JKT 10043

Senin - Kamis
09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
12.00 - 13.00 WIB

Faksimili:
(021) 57950288

email:
eppid@bpb.go.id

Jumat
09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
11.30 - 13.00 WIB

KOMISI INFORMASI

Masih Ada Temuan Berulang

BPK merekomendasikan kepada para menteri dan kepala badan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis memberikan sejumlah catatan atas laporan Keuangan tahun 2018 milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Badan POM. Meski laporan keuangan ketiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih adanya temuan berulang.

Hal tersebut diungkapkan Harry saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 ke tiga K/L tersebut, Senin (24/6). Hasil Pemeriksaan oleh BPK disajikan dalam tiga buku. Buku I soal LHP atas laporan keuangan yang berisikan tentang Opini BPK, Buku II LHP atas Sistem Pengendalian Intern yang memuat permasa-

lahan atas kelemahan pengendalian intern, dan Buku III LHP Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang memuat permasalahan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja.

Harry menjelaskan, BPK telah memeriksa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan pada Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, dan Badan POM.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapatnya temuan yang terjadi kembali di tahun 2018 atau dengan istilah lain temuan berulang, meskipun BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan tersebut pada pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017.”

Temuan-temuan tersebut terdapat pada pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja serta aset.

JENIS TEMUAN

a. Pengelolaan Pendapatan

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kemenkes, Kemendikbud, dan Badan POM masih belum tertib. Masih terdapat PNBP yang terlambat disetor atau kurang dipungut. Adapun temuan-temuan tersebut antara lain:

- 1) Penatausahaan PNBP pada sembilan satuan kerja di lingkungan Kemenkes belum tertib, di antaranya PNBP terlambat disetor ke Kas Negara/BLU, PNBP kurang dipungut, dan Tarif PNBP belum memiliki dasar hukum.
- 2) Kepatuhan terhadap PNBP. Ditemukan adanya pengelolaan dan penatausahaan PNBP belum memadai di lingkungan Kemendikbud, di antaranya penggunaan langsung atas PNBP yang telah memiliki dasar hukum maupun yang belum memiliki dasar hukum.
- 3) PNBP Fungsional pada BPOM belum tertib, di antaranya PNBP tidak langsung disetor, PNBP tidak dapat diidentifikasi dan kendala dalam penggunaan aplikasi.

b. Pengelolaan Belanja

Masih ditemukan adanya kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang belum dikenakan, kesalahan penganggaran dan bukti-bukti pertanggungjawaban atas realisasi belanja belum memadai. Permasalahan ini terjadi pada Kemenkes, Kemendikbud, dan Badan POM. Temuan-temuan tersebut antara lain:

- 1) Pengelolaan belanja barang bantuan pemerintah belum tertib pada Kemendikbud.
- 2) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada sembilan satuan kerja di lingkungan Kemenkes.
- 3) Kekurangan volume dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak pada 8 paket pekerjaan belanja modal di Badan POM.



■ Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis

Harry menjelaskan, penyebab utama terjadinya temuan-temuan berulang ini adalah Sistem Pengendalian Intern yang dirancang dan diimplementasikan belum dapat mencegah terjadinya penyimpangan. "Oleh karena itu BPK merekomendasikan kepada para menteri dan kepala badan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing," kata Harry.

Perubahan tata kelola APBN yang terjadi, ujar dia, menuntut para menteri dan kepala badan serta seluruh jajarannya untuk melakukan pembaruan atas Sistem Pengendalian Intern yang diimplementasikan. "Jangan sampai Sistem Pengendalian Intern yang diimplementasikan sudah tidak sesuai dengan pola pengelolaan APBN yang ada."

Kendati demikian, Harry sangat mengapresiasi atas upaya yang telah dilakukan Kemendikbud dan Kemenkes dalam mempertahankan opini WTP selama 6 tahun berturut-turut. Apresiasi juga diberikan ke-

pada Badan POM yang telah memperoleh WTP selama 5 tahun berturut-turut.

"Seluruh tahapan dalam rangka memberikan opini telah dilakukan *review* berjenjang untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara)," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Harry mengingatkan bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK agar disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK diterima. "Saya harapkan para menteri dan pimpinan lembaga menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan," kata Harry.

Selain itu, Harry berharap laporan hasil pemeriksaan dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi demi mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. ●

”

Jangan sampai Sistem Pengendalian Intern yang diimplementasikan sudah tidak sesuai dengan pola pengelolaan APBN yang ada.

Daerah Peraih WTP Meningkatkan

Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah dijadikan salah satu program kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Perkembangan Jumlah Pemda Peraih Opini WTP

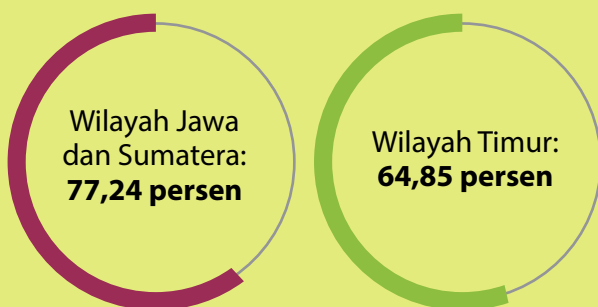
1. WILAYAH JAWA DAN SUMATERA



2. WILAYAH TIMUR



Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan



Sumber: AKN V, AKN VI

Peningkatan pencapaian opini atas laporan keuangan tak hanya terjadi di lingkup kementerian dan lembaga. Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga meningkat.

Bertambahnya jumlah pemerintah daerah (pemda) peraih WTP bukan hanya karena semakin baiknya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Tetapi juga karena keseriusan pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018 yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V menunjukkan, ada sebanyak 249 pemda yang mendapat opini WTP. "Jumlah itu bertambah sebanyak 13 pemerintah kabupaten/kota dari 236 pemda yang mendapat Opini WTP di tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen," kata Auditor Utama Keuangan Negara V Bambang Pamungkas.

Sebagai informasi, AKN V membawahi 16 perwakilan di wilayah Jawa dan Sumatera dengan jumlah entitas sebanyak 16 provinsi dan 267 kabupaten/kota. Secara terperinci, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018 menunjukkan sebanyak 16 pemerintah provinsi (pemprov) dan 223 pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini WTP, 30 pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tiga Kabupaten/Kota memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan satu kabupaten, yaitu Nias Selatan masih dalam proses pelaporan dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan *unaudited* dari pemerintah daerah kepada BPK.



■ Auditor Utama Keuangan Negara V, Bambang Pamungkas

”

Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah dijadikan salah satu program kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pemeriksaan LKPD TA 2018 di AKN V memfokuskan pada pengujian saldo dan transaksi atas akun-akun pada laporan keuangan dan akun-akun signifikan berkaitan dengan pelayanan publik serta kecukupan pengungkapan pada laporan keuangan yang berdasarkan *Risk Based Audit*. Akun-akun signifikan yang dimaksud antara lain belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja barang/jasa untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selain itu, berupa belanja modal serta pendapatan hibah melalui CSR. “Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemeriksaan yang diarahkan Anggota V BPK,” kata Bambang.

Khusus terkait belanja modal, Anggota V BPK RI Isma Yaton menetapkan kebijakan pemeriksaan secara terperinci terkait infrastruktur jalan dan jembatan, dan pengeluaran modal yang belum dikapitalisasi ke aset tetap.

Permasalahan yang masih sering ditemukan dalam pemeriksaan LKPD antara lain permasalahan dalam pengelolaan aset tetap baik penatausahaan maupun pemanfaatannya. Kemudian, pencatatan persediaan yang belum tertib, permasalahan dalam belanja modal yang mengakibatkan kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kesalahan dalam penganggaran pendapatan/belanja dan belanja perjalanan dinas, belanja hibah/bantuan sosial yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap.

Meski begitu, Bambang menyatakan, keseriusan pemda dalam melakukan tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk entitas di wilayah barat yang mencapai 77,24 persen. “Dari 226.773 rekomendasi yang disampaikan oleh BPK kepada entitas, sebanyak 175.162 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan,” katanya.

Dia menambahkan, percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah dijadikan salah satu program kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, program kerja yang dilaksanakan pemda dalam mencapai opini WTP atas LKPD secara umum adalah pembenahan dalam beberapa aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran, administrasi pendapatan daerah, administrasi belanja daerah, penatausahaan aset daerah. “Juga dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemrosesan transaksi dan pelaporan keuangan daerah,” ujar Bambang.

Dalam melakukan pemeriksaan, AKN V turut memberikan perhatian khusus kepada pemerintah daerah yang laporan keuangannya belum memperoleh opini WTP dan pemerintah daerah yang sedang menjadi perhatian masyarakat di media massa ataupun berdasarkan informasi dari pengaduan masyarakat.

“Kami juga memberikan perhatian khusus atas pemerintah daerah yang kepala daerah atau pejabat pemerintahnya tersangkut OTT atau kasus hukum lainnya. Informasi-informasi tersebut merupakan hal-hal yang bisa mempengaruhi secara signifikan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik, Anggota V BPK Isma Yaton setiap tahun menerbitkan Surat Edaran mengenai kebijakan Pemeriksaan LKPD yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD selain PMP, SPKN dan peraturan lainnya. Kemudian, setiap tahun dibentuk Tim Pokja Pemeriksaan LKPD yang dipimpin oleh salah satu Kepala Perwakilan dengan anggota para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf di lingkungan AKN V. “Melalui pokja inilah salah satu pola komunikasi dibangun untuk menyatakan persepsi dan gerak langkah dalam melakukan pemeriksaan LKPD,” Bambang menjelaskan.

Sementara, guna memastikan kebijakan tersebut telah terinformasikan, AKN V melakukan sosialisasi kepada seluruh pemeriksa pada BPK Perwakilan di lingkungan AKN V. Seluruh pemeriksa pun diwajibkan untuk mengikuti diklat pemeriksaan LKPD sebelum tim melaksanakan pemeriksaan. Secara berkala, AKN V melaksanakan rakor yang merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan seluruh kebijakan pemeriksaan, membahas rencana kegiatan berikutnya dan evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Media komunikasi lainnya yang juga kami manfaatkan adalah Portal Pemeriksaan yang memuat kebijakan serta paket peraturan dalam pemeriksaan LKPD dan dapat diakses oleh seluruh pemeriksa. Selain itu, setiap perwakilan juga secara berkala menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemeriksaan dua mingguan kepada Tortama KN V,” katanya.

Seperti diketahui, pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pemeriksaan interim dan pemeriksaan terinci. Pelaksanaan Pemeriksaan Interim dapat dilakukan pada tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya. Untuk LKPD TA 2018, misalnya, pelaksanaan pemeriksaan interim dilakukan pada akhir tahun 2018 dan/atau awal tahun 2019. Sedangkan Pemeriksaan Terinci dilaksanakan setelah pemda menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited kepada BPK yang menurut peraturan perundang-undangan paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Maret 2019. BPK mempunyai waktu 2 bulan untuk melaksanakan pemeriksaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan kepala daerah.

Wilayah Timur

Pencapaian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di wilayah timur juga mengalami peningkatan. Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa mengatakan, ada 189 pemerintah daerah yang meraih WTP atas LKPD Tahun 2018. Jumlah peraih WTP lebih banyak dibandingkan 2017 yang sebanyak 161 pemda.

Sebagai informasi, AKN VI selain membawahi pemeriksaan untuk Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, BPOM, BPJS dan



■ Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa

lembaga terkait di lingkungan entitas, juga membidangi pemeriksaan LKPD pada 18 provinsi di wilayah timur mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

“Untuk pemeriksaan laporan keuangan dari tahun ke tahun, kalau saya liat trennya ada peningkatan. Peningkatan itu tentunya dibarengi komitmen kepala daerah yang memang ingin meningkatkan opini,” ujar Dori.

Bahkan, kata Dori, ada lima provinsi yang semua pemerintah kabupaten/kotanya meraih opini WTP atas LKPD Tahun 2018, antara lain Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Dori menjelaskan, dalam pemeriksaan LKPD TA 2018 di wilayah timur, penatausahaan aset tetap masih menjadi permasalahan utama yang sering ditemukan. Permasalahan penatausahaan aset tetap antara lain berupa aset tetap yang tidak diketahui lokasi/keberadaannya, hasil rehab/renovasi gedung atau peningkatan jalan yang tidak dikapitalisasi ke aset induk namun dicatat sebagai aset baru, belum selesainya penilaian aset di bawah jalan dan irigasi, serta beberapa masalah lain seperti belum lengkapnya informasi di Kartu Inventaris Barang, dan belum optimalnya koordinasi antara bidang akuntansi dan bidang aset dalam merekonsiliasi pencatatan aset tetap.

Penyebab kondisi tersebut antara lain

”

Jadi, aset itu masih perlu dibenahi secara serius karena memang menjadi permasalahan utama, di samping permasalahan-permasalahan yang lain. Termasuk juga aset yang dikuasai oleh orang lain (pihak tertentu).

faktor historis berupa proses pemekaran daerah yang belum diikuti dengan validasi dan inventarisasi aset tetap. Selain itu, ketidaktegasan pemerintah daerah untuk mengambil aset milik daerah yang masih dikuasai oleh pejabat/pegawai yang telah pensiun, kekurangpahaman pegawai terhadap perlakuan akuntansi atas kegiatan rehab/renovasi/peningkatan aset gedung dan jalan, keterbatasan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia, dan lain-lain.

“Jadi, aset itu masih perlu dibenahi secara serius karena memang menjadi permasalahan utama, di samping permasalahan-permasalahan yang lain. Termasuk juga aset yang dikuasai oleh orang lain (pihak tertentu). Katakanlah pejabat yang sudah pensiun, tapi asetnya dibawa oleh yang bersangkutan, jadi asetnya belum dipindahkan,” ujar dia.

Selain permasalahan aset tetap, kata Dori, permasalahan pengelolaan Dana BOS juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah di wilayah timur. Dana BOS yang diterima oleh sekolah-sekolah dalam pengelolaan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi untuk SMA/SMK dan pemerintah kabupaten/kota untuk SMP/SD harus dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Beberapa pemerintah provinsi/kabupaten/kota masih kesulitan dalam melakukan koordinasi pencatatan akuntansi dari pengelolaan Dana BOS dengan banyaknya jumlah sekolah.

Hal tersebut terutama disebabkan antara lain oleh faktor geografis dari sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil. Kondisi itu menyulitkan upaya koordinasi terkait manajemen BOS serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan dari pengurus BOS di sekolah-sekolah tersebut.

Kendati begitu, secara umum pemerintah daerah di wilayah timur telah memiliki komitmen dan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Ia menjabarkan, persentase tindak lanjut pada 2018 sudah mencapai 64,85 persen. Tingkat tindak lanjut terus meningkat dari 2016 yang sebesar 50,12 persen dan 2017 sebesar 54,64 persen. “Target BPK itu 65 persen. Jadi, sudah mendekati target BPK,” katanya.

Secara spasial, persentase tindak lanjut rekomendasi per kabupaten sudah banyak yang

mencapai 80 persen. Bahkan, ada juga yang telah mencapai 90 persen. “Rekomendasi BPK yang dikeluarkan BPK cukup diperhatikan oleh pemerintah daerah,” ucap Dori.

Kebijakan AKN VI dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

1. Melaksanakan upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut terutama untuk rekomendasi atas LHP-LHP lama yang belum selesai ditindaklanjuti, dengan cara memetakan kendala dan permasalahan penyelesaian tindak lanjut, beserta alternatif solusi penyelesaiannya.
2. Menyusun pedoman percepatan penyelesaian TLRHP.
3. Meminta Perwakilan untuk mensosialisasikan pedoman percepatan penyelesaian TLRHP ke masing-masing pemda.
4. Meminta masing-masing pemda untuk menandatangani surat pernyataan komitmen penyelesaian tindak lanjut beserta target yang akan dicapai.
5. Melaksanakan FGD percepatan penyelesaian TLRHP dengan pemda sesuai zonasi.
6. Membentuk Pokja Penyelesaian TLRHP.
7. Melakukan reviu silang antar Perwakilan atas usulan penetapan status 1 dan status 4 guna menjamin ketepatan dan kelengkapan dokumen pendukung dalam penetapan status TLRHP sebelum ditetapkan oleh Anggota.

Selain tujuh langkah tersebut, BPK juga melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) yang memanfaatkan data elektronik melalui sistem yang berbasis web menggantikan pemantauan tindak lanjut secara manual, pemerintah daerah di wilayah timur masih memiliki kendala terutama dalam hal ketersediaan jaringan internet yang belum memadai, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. “Namun demikian, kami akan terus berupaya mendorong partisipasi pemerintah daerah di wilayah timur agar menggunakan SiPTL BPK dalam rangka untuk lebih meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” kata Dori. ●

BPK Hadiri Pertemuan ke-11 INTOSAI KSC Steering Committee

BPK sebagai *project leader* melaporkan hasil penelitian mengenai *Auditing Emergency Preparedness*.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara III, Blucer W. Rajagukguk beserta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Juska Meidy Enyke Sjam dan Tim Penyusun *Paper* Proyek Penelitian *Auditing Emergency Preparedness*, menghadiri pertemuan ke-11 INTOSAI Steering Committee of Knowledge Sharing and Knowledge Services (KSC) pada tanggal 12-14 Juni 2019 di Clark, Pampanga, Filipina.

Pertemuan ini dihadiri oleh 34 peserta dari 10 SAI beserta tiga perwakilan organisasi INTOSAI (IDI, Sekretariat INTOSAI dan INTOSAI Journal) dan dibuka oleh Commissioner of the Commission on Audit of Republic of Philippines, Jose A. Fabia. Pada pidato sambutannya, Fabia menekankan pentingnya pertemuan ini karena KSC memiliki peran besar dalam pengembang-



■ KSC SC Meeting Pampanga-Presentasi WGEA.

an audit dan peningkatan kapasitas auditor para SAI. Peningkatan kapasitas audit dilakukan oleh kelompok kerja dalam berbagai bidang seperti *procurement audit*, *environmental audit*, *extractive industries*, *big data*, dan *emergency preparedness audit*.

Pada sambutan berikutnya dari Ketua KSC, Rajiv Mehrishi, selaku Comptroller and Auditor General of India berterima kasih kepada SAI Filipina yang telah menjadi tuan rumah pertemuan dan menyebutkan pentingnya pertemuan ini sebagai *milestone* untuk mempersiapkan pelaporan KSC pada INCOSAI 2019 serta INTOSAI Governing Board Meeting 2020.

Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan dan mendiskusikan

pencapaian dari para kelompok kerja (*Working Group*), *cross cutting issues* untuk tema *research project* selanjutnya, penggunaan anggaran KSC, serta KSC *work plan* 2020-2022. Pertemuan ini juga dihadiri oleh SAI Malaysia sebagai *new observer* yang juga menjadi anggota *Working Group on IT Audit*, *Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering* dan *Working Group on Environmental Auditing*.

BPK sebagai *project leader* melaporkan hasil penelitian mengenai *Auditing Emergency Preparedness*. Di hari kedua pertemuan, Ketua BPK RI sebagai Ketua INTOSAI WGEA, melaporkan perkembangan dan pencapaian *work plan* 2017-2019 INTOSAI WGEA. Kedua laporan tersebut diterima dengan baik oleh KSC. ●



■ Paparan WGEA dalam KSC SC Meeting Pampanga.



■ Foto bersama para anggota KSC SC Meeting Pampanga.

BPK-BOA Japan Berbagi Ilmu Manajemen SDM

Selain membahas pengembangan SDM, kedua SAI bersepakat memberikan dukungan positif untuk peningkatan peran BPK dan BOA Japan di komunitas lembaga audit internasional.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Bahrullah Akbar melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Board of Audit of Japan (BOA) Mari Kobayashi di kantor BOA, Tokyo, Jepang, Jumat (28/6).

Dalam pertemuan tersebut, Bahrullah didampingi Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK Haedar dan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Juska Meidy Enyke Sjam. Adapun dari pihak BOA Japan, turut hadir Takashi Katae selaku Assistant Secretary General beserta perwakilan dari Divisi International dan Pengembangan Kapasitas Pegawai.

BPK RI dan BOA Japan saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM), mulai dari sistem rekrutmen pegawai, jenjang karir, hingga pengembangan kompetensi dan integritas pemeriksa.

BOA Japan dalam paparannya menjelaskan bahwa mereka memiliki sekitar 800 orang pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan di lapangan atau sekitar dua per tiga dari kuota yang ada. Para pemeriksa pindah divisi setiap dua hingga tiga tahun dan melakukan pemeriksaan di berbagai badan pemerintah.

Dari sisi perekrutan dan pengembangan pegawai, pemeriksa yang direkrut merupakan pegawai yang telah lulus ujian ASN di seluruh kementerian. Perekrutan dilaksanakan di berbagai bidang keahlian (selain bidang hukum dan ekonomi,



■ Courtesy Call



■ Sesi foto bersama dengan Presiden BOA Japan.

juga bidang teknik sipil, arsitek, mesin, dan lainnya).

Pemeriksa pada BoA Japan diharuskan memiliki 3 kemampuan yaitu kemampuan pengetahuan yang profesional (memiliki pengetahuan yang luas dibidang regulasi yang berkaitan dengan keuangan, pemerintahan, keuangan publik, teknik sipil, arsitek, IT, dan sebagainya). Kemampuan keahlian (*skill*) yaitu kemampuan untuk membuat rencana pemeriksaan, menemukan permasalahan, analisis, dan pembuktian, memutuskan kebijakan pemecahan permasalahan dan sebagainya. Serta kemampuan Etika Pekerjaan yaitu melihat dari perspektif pembayar pajak (wajib pajak), kepatuhan terhadap disiplin kerja, memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam pekerjaannya.

Apabila BOA Japan membutuhkan kemampuan khusus, maka akan memanfaatkan kemampuan para tenaga ahli yang diambil dari dalam maupun luar institusi dengan masa kerja tertentu.

Selain berbagi ilmu soal manajemen SDM, BOA Japan dalam kesempatan tersebut meminta dukungan BPK atas posisi mereka sebagai representatif ASOSAI di Governing Board INTOSAI. Mereka pun turut mendukung target BPK untuk menjadi Ketua INTOSAI periode 2025-2028. Kedua SAI bersepakat memberikan dukungan positif untuk peningkatan peran BPK dan BOA Japan di komunitas lembaga audit internasional. ●



■ Wakil Ketua BPK bersama dengan Presiden BOA Japan.

SYAMSUDIN, STAF AHLI BPK
 BIDANG KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pemeriksa adalah Profesi Mulia



■ Syamsudin, Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Daerah

Syamsudin tak berpikir dua kali ketika mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Baginya, bekerja di BPK merupakan tugas yang mulia. Ia yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, memulai kariernya betul-betul dari bawah, yaitu sebagai penilik. Namun, berkat integritasnya, Syamsudin terus mendapat kepercayaan untuk mengemban posisi yang lebih tinggi. Kepada *Warta Pemeriksa*, Syamsudin membagikan kisah perjalanan kariernya dari awal hingga saat ini. Berikut petikan wawancara dengannya.

Bagaimana perjalanan karir anda hingga berada di posisi sekarang?

Seperti para senior lulusan STAN yang lain yang masuk ke BPK, saya masuk menjadi pegawai BPK sejak kuliah tingkat II. Saya lulus D-III STAN tahun 1992, dan saya sudah ikatan dinas menjadi CPNS BPK sejak tahun 1991, saat kuliah tingkat II. Setelah lulus, saya mengikuti beberapa diklat yang diselenggarakan oleh BPK, di antaranya diklat Prajabatan Golongan II dan diklat kursus penilik. Penilik adalah suatu sebutan jenjang pemeriksa di BPK yang posisinya urutan kedua dari bawah. Di bawah penilik ada jenjang Verifikatur. Dalam diklat kursus penilik tersebut kami diajarkan teknik-teknik pemeriksaan, termasuk teknik pemeriksaan kas, pemeriksaan persediaan pada TNI dan Polri dan pemeriksaan yang lain. Selain diklat yang diselenggarakan oleh BPK, saya juga diikutkan diklat "Manajemen Audit" yang diselenggarakan oleh BPKP.

Setelah diklat selesai, saya ditempatkan pada Subbagset Auditorat E yang membidangi pemeriksaan pertanian, kehutanan, perindustrian dan koperasi. Tugas saya selaku staf pada sekretariat auditorat adalah mencatat surat keluar dan surat masuk, mengantar surat atau nota dinas ke unit kerja yang terkait dengan Auditorat E. Selain itu, ada juga tugas memfotokopi dan mengetik surat-surat menggunakan mesin ketik manual. Itulah tugas satu tahun pertama saya, sebagai langkah orientasi memahami tugas BPK, instansi tercinta saya. Lebih dari satu tahun, tugas saya adalah menangani administrasi pemeriksaan dan tidak ada penugasan pemeriksaan.

Baru pada tahun 1994, saya ditugaskan melakukan pemeriksaan. Penugasan ini adalah penugasan yang sangat berkesan, karena merupakan penugasan pemeriksaan yang pertama dan sekaligus sebagai pengalaman pertama saya naik pesawat terbang. Ada beberapa kesan dalam pemeriksaan pertama ini, di antaranya kesulitan melaksanakan prosedur audit di lapangan.

Sebagai contoh, menguji saldo persediaan. Ternyata tidaklah mudah menghitung jumlah persediaan secara benar, apalagi menghitung persediaan kayu yang tenggelam di dalam air yang diduga bercampur dengan kayu ilegal. Jika saya hanya menganalisis persediaan dalam catatan pembukuan dan laporan bulanan saja, maka tidak ditemukan permasalahan, semua sudah cocok.

Namun setelah menghitung ke tempat persediaan kayu ternyata jumlahnya lebih banyak dari catatan pembukuan. Ada kayu yang tidak atau belum dilaporkan dalam pembukuan yang berarti juga belum dibayarkan iuran kehutannya. Setelah ditemukan permasalahannya, kemudian diminta merumuskan temuan pemeriksaannya. Bagi saya selaku auditor pemula waktu itu, banyak mengalami kesulitan dalam merumuskan suatu temuan pemeriksaan. Konsep yang saya ajukan beberapa kali dikoreksi, yang menurut ketua tim supaya mudah dipahami oleh pembacanya. Dari situlah saya menyadari bahwa auditor itu harus banyak belajar, tidak hanya sekadar belajar menemukan permasalahan, tetapi juga belajar menyusun laporan temuan pemeriksaan yang mudah dipahami oleh para pembaca.

Di samping belajar teori dari buku atau dari diklat, saya juga belajar praktik audit dari para senior. Ada teknik-teknik pemeriksaan inovatif yang tidak saya temukan dalam buku teori. Selain itu, saya juga menyadari bahwa pekerjaan pemeriksaan adalah pekerjaan praktik yang akan tumbuh kemahirannya setelah praktik di lapangan. Semakin sering memeriksa, maka akan semakin lancar melaksanakan prosedur audit dan semakin banyak muncul ide-ide atau insting auditor untuk membuktikan dugaan-dugaan suatu penyimpangan.

Hal apalagi yang diajarkan oleh auditor senior kepada Bapak saat itu sebagai auditor junior?

Pelajaran lain dari para senior adalah pelajaran berperilaku. Selain belajar kompetensi teknis pemeriksaan, senior

juga mengajarkan perilaku kepada saya untuk menjaga integritas. Saya pernah diuji oleh auditor senior masalah integritas saya.

Pertama, saya *ditawarin* "uang", yang jumlahnya pada waktu itu menurut ukuran saya adalah sangat besar. Saya sampaikan kepada rekan tim saya bahwa uang seperti ini *gak* boleh diterima menurut agama. Atas jawaban tersebut, rekan saya langsung menimpalnya, "jangan ditolak, terima saja untuk kekompakan dalam suatu tim". Bagi saya ini suatu dilema, jika saya terima, maka bertentangan dengan bisikan hati nurani, namun jika ditolak maka akan mengganggu kekompakan tim dan ada kekhawatiran tidak akan diajak lagi dalam penugasan berikutnya karena dianggap tidak kompak dan tidak dapat bekerja sama. Saya pun bingung menghadapi dilema ini.

Ada senior yang lain yang memberikan jalan keluar atas kebingungan saya, yaitu jika memungkinkan untuk ditolak, maka tolaklah dengan cara yang baik, dan jika tidak mungkin ditolak maka uang itu diterima dan disalurkan untuk membantu yatim piatu atau memperbaiki fasilitas umum. Akhirnya ada masukan dari senior, bahwa pemberian uang itu sebenarnya hanya ujian dari senior untuk mengetahui integritas auditor, jika auditor menerima maka senior akan menyimpulkan bahwa auditor tersebut kurang berintegritas dan jika menolak maka dianggap auditor yang berintegritas. Itulah pelajaran dari senior yang pertama.

Pelajaran lain dari senior adalah teknik pengujian saldo kas dan saldo bank. Dalam buku teori, pengujian kas dilakukan dengan melakukan *cash opname*, namun bagaimana teknik *cash opname* dilakukan secara efektif, maka auditor perlu belajar dari senior para senior. Teknik yang pernah saya peroleh adalah "teknik dua kali *cash opname*", yaitu *cash opname* di awal pemeriksaan yang biasanya para bendahara sudah mempersiapkannya dan biasanya tidak ditemukan suatu permasalahan, kemudian lakukan juga *cash opname* kedua, menjelang akhir pemeriksaan secara mendadak yang waktunya tidak disangka-sangka oleh bendahara/pengelola kas dan inilah hasil pengujian yang riil, jika ada permasalahan maka pada saat *cash opname* kedua akan ditemukan.

Selain teknik pengujian kas, ada juga teknik konfirmasi saldo bank, yaitu auditor meminta kepada bendahara atau kepala satker yang mengelola rekening yang digunakan untuk mengelola uang negara, agar meminta kepada bank supaya memberikan informasi saldo bank atau rekening korannya kepada auditor, jadi jawaban konfirmasi bank langsung disampaikan kepada tim audit. Teknik ini pernah saya lakukan untuk menguji saldo kas di bank yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat pada saat pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang pertama Tahun 2004. Dari teknik konfirmasi ini ditemukan rekening-rekening Pemerintah Pusat yang belum dilaporkan dalam LKPP yang jumlahnya cukup banyak yang kemudian dikenal dengan sebutan "Rekening Liar". Jumlah dan saldonya relatif besar

dan menjadi bagian signifikan dari pertimbangan opini LKPP waktu itu. Itulah di antaranya beberapa pelajaran yang diberikan oleh para senior, baik terkait kompetensi teknis pemeriksaan maupun kompetensi perilaku yang mengutamakan kejujuran atau integritas auditor.

Pengalaman apa yang paling berkesan selama karier di BPK?

Yang paling berkesan selama jadi pemeriksa, di antaranya adalah pada saat memeriksa LKPP dan menemukan "Rekening Liar". Temuan ini waktu itu menjadi heboh karena BPK berhasil mengungkap ribuan rekening milik Pemerintah Pusat yang nilainya triliunan yang tidak dilaporkan dalam LKPP pada periode awal sekitar tahun 2004 dan 2005. Kementerian Keuangan selaku pihak penyusun LKPP waktu itu tidak memiliki data rekening-rekening yang menjadi milik pemerintah yang tersebar pada banyak instansi. Atas data dan rekomendasi yang diberikan BPK, kemudian Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan, melakukan penertiban rekening dengan melakukan penelusuran data awal dari BPK. Dari langkah penertiban rekening ini, kemudian banyak rekening yang ditutup dan saldonya disetorkan ke kas negara dan semua rekening yang dipergunakan untuk pengelolaan uang negara harus mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Inilah yang paling berkesan menurut saya karena Pemerintah Pusat sangat positif menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit BPK dan hasilnya triliunan uang negara bisa diselamatkan masuk ke kas negara.

Pengalaman lain yang cukup berkesan adalah ketika saya promosi menjadi Kepala Subauditorat di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Kesan itu muncul ketika saya menolak atau menghindari untuk dipromosikan ke BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Alasan penolakannya adalah karena pada saat saya melakukan pemeriksaan investigasi di salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, saya sudah pernah memperoleh informasi ancaman bunuh dari suatu oknum melalui pesan singkat SMS yang dikirimkan kepada *contact person* tim saya.

Ancaman itu muncul setelah saya melakukan *cash opname* dan menemukan beberapa dokumen penyimpangan pengelolaan kas untuk belanja bansos. Karena ancaman inilah kemudian saya menolak/menghindar untuk promosi tersebut. Namun saya kaget ketika jawaban Tortama yang menjadi atasan saya adalah masalah keimanan, yaitu bahwa "kematian adalah takdir Allah, jika belum sampai saat ajalnya, *gak bakalan* mati, tapi jika sudah ajalnya, maka di manapun kita berada ya tetap mati juga". Ini adalah jawaban yang mengagetkan saya, yaitu jawaban argumen keimanan kepada takdir yang saya pun akhirnya tunduk dan tidak dapat mengelak lagi.

Akhirnya saya terima keputusan dan dukungan atasan saya dan saya promosi ke BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Setelah menjalani beberapa tahun tugas pemeriksaan di Aceh saya pun kembali memperoleh informasi ancaman berupa penculikan dari seorang oknum. Ancaman muncul setelah tim kami



■ Syamsudin, Staf Ahli BPK
Bidang Keuangan Pemerintah Daerah



Pekerjaan pemeriksaan adalah pekerjaan praktik yang akan tumbuh kemahirannya setelah praktik di lapangan.

berhasil mengungkapkan ketekoran kas dan kami minta supaya ketekoran kas harus dikembalikan ke kas daerah, jika tidak maka opini atas laporan keuangan akan turun. Kemudian ketekoran itu dikembalikan ke kas daerah, namun pada saat yang bersamaan juga muncul informasi ancaman penculikan.

Pengalaman seperti apa yang Bapak dapatkan saat bertugas di Aceh?

Saya bertugas di Aceh sekitar tiga tahun, yaitu pada tahun 2010 – 2013. Cukup banyak pengalaman yang saya peroleh dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Pengalamannya unik, karena belum tentu terjadi di daerah lain, apalagi di Kantor Pusat. Kalau di Kantor Pusat, selaku kepala Subauditorat itu tidak berhadapan langsung dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat pemangku kepentingan BPK, karena di atasnya masih ada Kepala Auditorat dan Tortama.

Namun, kalau di BPK Perwakilan, termasuk Perwakilan Provinsi Aceh, pada saat Kepala Perwakilan sedang tugas ke Kantor Pusat, maka para Kepala Subauditorat yang ditunjuk menjadi Pelaksana Harian Kepala Perwakilan (PIh. Kalan) itu langsung menghadapi permasalahan yang terjadi di masyarakat, misalnya ada demonstrasi, ancaman kerusuhan pilkada, dan permasalahan lain yang terjadi pada pemangku kepentingan BPK. Ada pengalaman unik yang mungkin tidak terjadi di tempat lain, yaitu ketika menghadapi Pilkada Aceh sekitar Tahun 2012 – 2013.

Waktu itu, Kepala Perwakilan sudah mutasi ke Kantor Pusat, namun penggantinya yang definitif belum ada dan ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan (Plt Kalan) yang dalam periode tersebut terjadi dua kali penunjukkan Plt Kalan. Pada saat keamanan genting menjelang Pilkada Aceh tersebut dan Kalan atau waktu itu Plt Kalan sedang tugas di Jakarta, maka saya bersama para kasubaud dan pejabat yang lain harus bahu-membahu untuk memonitor keamanan para auditor kami di lapangan. Kami harus selalu *update* meminta informasi keamanan dari aparat keamanan TNI/Polri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Suasana menjadi mencekam ketika kami menerima informasi bahwa sebaiknya para warga, termasuk pegawai BPK Perwakilan, tidak keluar rumah setelah waktu malam tiba. Setelah informasi penting ini kami terima, rupanya benar terjadi beberapa kali penembakan terhadap warga dan jatuh korban warga masyarakat.

Situasi keamanan selalu kami laporkan kepada Kalan atau Plt Kalan dan kami usulkan strategi pengamanan para auditor. Kami petakan daerah-daerah yang rawan keamanannya dan kami usulkan agar Tim Pemeriksa ditarik dari lapangan. Kami juga minta pengamanan dari TNI/Polri untuk menjaga kantor dan mess/rumah dinas BPK Perwakilan. Untuk mengantisipasi keamanan anggota keluarga, beberapa keluarga pegawai juga sudah diungsikan ke kampung halamannya. Itulah suka duka dan pengalaman berharga saat tugas di Aceh yaitu menghadapi situasi keamanan yang kurang kondusif dan harus ikut memikirkan keamanan para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Bapak pernah menjadi Kepala Perwakilan di Jakarta, tantangan seperti apa yang ditemukan saat itu?

Ketika saya mutasi ke BPK Perwakilan DKI, saya memandang situasinya menurut saya cukup sulit dan ini saya anggap sebagai tantangan, karena hubungan kerja dengan Pemprov DKI pada saat itu, masih belum kondusif setelah terjadi ketegangan atas kasus pengadaan tanah pada Rumah Sakit Sumber Waras. Selain itu, semangat para auditor juga sempat melemah pasca pengungkapan kasus tersebut.

Menghadapi situasi tersebut, maka saya mengambil dua langkah. Pertama, melakukan normalisasi hubungan dengan Pemprov DKI supaya hubungan kerja dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, saya aktif melakukan komunikasi dengan Gubernur DKI, Sekda dan para kepala satker. Saya sampaikan rekan-rekan di Pemprov DKI bahwa semangat kami adalah sama dengan semangat Pemprov DKI, yaitu semangat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara pada Pemprov DKI.

Dengan kami sering berkunjung dan berdiskusi mengenai tugas dan kewajiban kami kepada Pemda, akhirnya Pemprov DKI memahami dan terus menerus melakukan upaya perbaikan, termasuk membicarakan tindak lanjut penyelesaian kasus Sumber Waras. Kedua, melakukan konsolidasi internal dengan para auditor dan pegawai pada sekretariat BPK

Perwakilan. Saya bertekad harus dapat memompa semangat para pegawai untuk dapat bekerja secara professional. Tim Pemeriksa pun mulai bangkit dan dalam pemeriksaan laporan keuangan berikutnya, berhasil mengungkapkan kasus pengadaan tanah di Cengkareng, yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset milik Pemprov DKI.

Apakah dari awal sudah bercita-cita masuk BPK?

Kalau ditanya cita-cita, awalnya saya ingin menjadi ahli Kimia. Oleh karena itu waktu SMA saya ambil jurusan Fisika. Namun, dengan pertimbangan aspek ekonomi keluarga dan biaya kuliah yang cukup besar, maka saya cari kuliah yang gratis, saya masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dari SMA ke kuliah terjadi perubahan arah cita-cita yang bertolak belakang, dari jurusan Fisika waktu SMA dan kuliahnya ambil jurusan akuntansi.

Ketika kuliah tingkat II STAN, saya yang masih berstatus mahasiswa sudah diberikan pilihan penempatan instansi tempat bekerja, saya langsung pilih BPK dengan pertimbangan waktu itu karena BPK merupakan lembaga tinggi negara dan tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Apa yang membuat bapak memilih BPK?

Ada beberapa pilihan instansi tempat bekerja yang diberikan kepada Mahasiswa STAN, di antaranya: BPK, BPKP, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Itjen Depkeu. Dari pilihan tersebut, saya pilih BPK, karena dilihat dari posisinya waktu itu, hanya instansi BPK yang posisinya sebagai Lembaga Tinggi Negara, jadi cukup membanggakan.

Alasan lain adalah senior-senior kami dari STAN yang masuk ke BPK aktif memberikan informasi, termasuk informasi peluang untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, penempatannya waktu itu seluruhnya masih di Jakarta serta berdasarkan informasi dari para senior kami tersebut, di BPK peluang untuk melanjutkan sekolah cukup besar dan relatif lebih mudah dibandingkan instansi yang lainnya.

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat saya memilih BPK dan saya bersyukur sekali dapat masuk ke instansi BPK. Apalagi sekarang BPK kemajuannya sangat luar biasa. BPK menjadi Instansi yang sangat berwibawa dan disegani oleh instansi pengelola keuangan negara. Kiprahnya tidak hanya pada tingkat nasional, melainkan juga pada tingkat internasional.

Apakah ada hobi yang sering bapak lakukan?

Kalau ditanya hobi, maka hobi saya adalah membaca, sedangkan olah raga yang saya sukai adalah tenis meja dan jalan kaki.

Bagaimana cara Bapak mengatasi tekanan saat bekerja?

Prinsipnya adalah mengupayakan semua berjalan seimbang. Target penyelesaian laporan ini sering memberikan



Kontribusi prestasi para pegawai akan makin memperkuat peranan BPK dalam berkontribusi mewujudkan tujuan bernegara sehingga keberadaan BPK juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

tekanan dan memaksa kita bekerja keras sampai larut malam, namun saya menyadari bahwa tubuh ini punya keterbatasan dan perlu istirahat sehingga ketika tubuh sudah memberikan *warning* kelelahan atau tidak enak badan, maka saya harus sempatkan tidur untuk beristirahat, walaupun cuman sesaat supaya tenaga bisa pulih kembali. Selain itu, kita juga melaporkan perkembangan pekerjaan kita kepada atasan untuk mendapatkan masukan dari atasan.

Motivasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pegawai muda di BPK?

Peranan BPK, jika dilihat dari aspek agama mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu tugas memeriksa untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara (*amar ma'ruf*) dan mencegah atau mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (*nahi munkar*). *Amar ma'ruf, nahi munkar*.

Tugas *amar ma'ruf* dapat auditor lakukan secara lebih luas ketika melakukan jenis pemeriksaan keuangan dari aspek SPI atau ketika melakukan jenis pemeriksaan kinerja, di mana auditor harus memikirkan ide-ide perbaikan sistem dalam pengelolaan keuangan negara yang akan dituangkan dalam rekomendasi hasil pemeriksaannya. Adapun tugas *nahi munkar*, dapat auditor lakukan ketika memeriksa laporan keuangan dari aspek kepatuhan atau ketika sedang melakukan jenis pemeriksaan PDTT, untuk mencegah dan menindak mengungkap atau melaporkan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Jadi, kalau auditor BPK sedang melakukan pemeriksaan, maka sebenarnya auditor juga sedang melaksanakan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, suatu tugas yang sangat mulia.

Selain itu, kita sebagai pegawai BPK juga patut berbangga karena prestasinya, instansi BPK disegani baik pada tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, para pegawai muda BPK juga harus mampu menjaga kewibawaan dan kebanggaan prestasi ini dengan selalu meningkatkan kemampuannya, baik kemampuan teknis pemeriksaan maupun

kemampuan dalam berperilaku yang menunjang tinggi sikap integritas, independensi dan profesionalisme sebagai pegawai BPK. Kontribusi prestasi para pegawai akan makin memperkuat peranan BPK dalam berkontribusi mewujudkan tujuan bernegara sehingga keberadaan BPK juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Apa yang menjadi fokus Bapak saat ini sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah?

Dengan mendasarkan kajian tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan Pemda kepada transfer Pemerintah Pusat itu sangat besar, maka kajian selanjutnya akan saya fokuskan pada potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan belanja APBD untuk peningkatan PAD oleh Pemda. Jika PAD naik, maka jumlah pengeluaran belanja APBD juga naik dan diharapkan kesejahteraan masyarakat di daerah juga naik.

Kajian ini akan saya lakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian dari pihak lain seperti Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan Bank Indonesia. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan kepada Pimpinan BPK dalam perumusan kebijakan pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemda, khususnya dalam peningkatan peranan *insight* dan *foresight* BPK.

Bagaimana caranya agar Pemerintah Daerah bisa mengurangi ketergantungannya kepada Pemerintah Pusat?

Jika kita melihat rumus rasio ketergantungan keuangan pemda, maka jawaban pertanyaan ini mudah namun sulit implementasinya. Untuk mengurangi ketergantungan keuangan Pemda kepada Pemerintah Pusat, berdasarkan rumus tersebut adalah dengan meningkatkan PAD-nya, baik melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi PAD. Akan tetapi, implementasi jawaban ini sangat sulit.

Apabila Pemda salah mengambil kebijakan justru dapat mematikan perekonomian di daerah yang berdampak pada penurunan PAD. Sebagai contoh, jika Pemda menaikkan tarif pajak atau retribusi daerah secara tidak tepat, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan menurun dan dapat berdampak juga pada berkurangnya penerimaan PAD. Selain itu, Pemda juga harus memperhatikan potensi sumber daya yang dimilikinya, jika potensi alam banyak, namun kualitas dan kuantitas SDM terbatas, juga sulit untuk mengeksekusi potensi menjadi PAD.

Oleh karena itu, mungkin inilah seninya mengelola keuangan daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan penerimaan PAD. Meskipun sulit, namun kita mungkin dapat belajar dari beberapa daerah yang telah berhasil mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerahnya dan PAD-nya terus meningkat serta jumlah pengeluaran dalam APBD-nya juga terus melonjak. ●

OLLY DONDOKAMBEY, GUBERNUR SULAWESI UTARA

Rekomendasi BPK Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selama lima tahun berturut-turut meraih opini

Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Di balik capaian tersebut, ada banyak kebijakan dan kerja keras yang telah dilakukan. Kepada *Warta Pemeriksa*, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menjelaskan secara panjang lebar mengenai langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Sulut dalam mengelola keuangan daerah. Berikut petikan wawancara dengannya.



■ Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey



Opini WTP sangat mendukung tercapainya target-target daerah karena mendorong investasi swasta baik dari luar negeri maupun dalam negeri serta lebih memperlancar program-program pemerintah pusat di Sulawesi Utara serta percepatan pelaksanaan APBD.

LKPD Sulawesi Utara Tahun 2018 kembali meraih opini WTP. Dengan demikian, Pemprov Sulut sudah lima tahun berturut-turut meraih opini WTP. Apa saja kebijakan yang telah dilakukan dalam meningkatkan tata kelola keuangan?

Kebijakan yang kami lakukan antara lain penataan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Kemudian, melakukan pendidikan dan pelatihan SDM keuangan bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BPK RI, Kementerian Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek) internal.

Selain itu, kami menerapkan transaksi non-tunai, pembaruan sistem dan prosedur pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan (APBD) setiap tahun, penerapan *e-planning*, *e-budgeting*, SimDa Keuangan, SimDa Barang Milik Daerah, SimDa gaji, *cash management system* (CMS) bekerja sama dengan BPKP dan Bank SulutGo.

Menurut Bapak, sejauh mana manfaat hasil pemeriksaan BPK terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemprov Sulut?

Manfaat hasil pemeriksaan BPK sangat bagus dan mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu juga sebagai sarana dalam mengoreksi kesalahan dan membenahi kekurangan dalam pengaturan tata kelola ke-

uangan dan pelaksanaan kegiatan serta mendisiplinkan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan.

Saat penyerahan LKPD 2018, Anggota VI BPK Harry Azhar Azis menilai Pemprov Sulut telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan Pemprov Sulut terkait hal tersebut?

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibimbing oleh BPKP dan saat ini telah mencapai maturitas level 3 yang antara lain:

a. Lingkungan Pengendalian

- Pelaksanaan *assessment* untuk calon eselon 2, 3 dan 4.
- Penandatanganan pakta integritas dan surat pengunduran diri untuk pejabat eselon 2, 3 dan 4.
- Proses *job fit* dan *open bidding* untuk eselon 2.
- Proses penilaian kinerja dan kompetensi untuk calon eselon 3 dan 4.
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan Pelayanan Publik.
- Penerapan e-kinerja berbasis web untuk setiap ASN;
- Pembinaan mental bulanan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah agar ASN loyal, berdedikasi, berkorban, berprestasi serta melarang segala jenis setoran kepada atasan;
- Setiap hari Kamis Pagi pembinaan mental sesuai agama masing-masing oleh tokoh agama.

b. Penilaian Risiko

- Telah dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Daerah bagi seluruh perangkat daerah untuk identifikasi risiko setiap kegiatan dan pencapaian tujuan perangkat daerah.
- Evaluasi peta risiko oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta aktifitas pengendalian untuk meminimalkan risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

- Penyusunan keputusan gubernur untuk stan-

standard operating procedure (SOP) untuk setiap perangkat daerah.

- Aturan pelaksanaan APBD setiap tahun.

d. Informasi dan Komunikasi

- Dibangun *command center*, Unit Layanan Administrasi (ULA), aplikasi pelayanan berbasis web, juga aplikasi pengelolaan keuangan (*e-planning, e-budgeting*, SimDa Keuangan, SimDa Barang Milik Daerah, SimDa gaji, e-kinerja, SIRUP ULP dan lainnya).

e. Pemantauan

- Minimal sebulan 1 kali *monitoring* dan evaluasi program/kegiatan serta penyerapan anggaran oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi dan Asisten;
- *Monitoring* dan evaluasi mingguan oleh Kepala perangkat daerah;
- *Monitoring* dan evaluasi sesuai penugasan oleh Inspektorat Daerah.

BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan Pemprov Sulut. Bagaimana penilaian bapak atas rekomendasi yang dikeluarkan terkait LKPD 2018?

Rekomendasi BPK atas LKPD 2018 sangat membantu untuk lebih menyempurnakan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terutama dalam pertanggungjawaban dan penyusunan LKPD.

Bagaimana cara Pemprov Sulut dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK?

Proses tindak lanjut dilakukan oleh para perangkat daerah terkait dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Secara periodik dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi. Jika belum tuntas, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Majelis TP-TGR) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Upaya terakhir dilakukan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

Bagaimana sejauh ini sinergi antara Pemprov Sulut dan BPK?

Sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BPK selama ini terjalin hubungan yang harmonis dan sesuai ketentuan, termasuk da-

lam proses konsultasi pelaksanaan kegiatan, konsultasi penerapan aturan, serta *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Apa harapan Bapak terhadap peran BPK pada masa yang akan datang?

Harapan untuk BPK adalah secara aktif lebih komunikatif dalam pelaksanaan konsultasi dan proses audit/pemeriksaan agar penyempurnaan pengelolaan keuangan lebih cepat terwujud.

Menurut bapak apakah opini WTP dapat menjadi kunci pencapaian target-target daerah?

Opini WTP sangat mendukung tercapainya target-target daerah karena mendorong investasi swasta baik dari luar negeri maupun dalam negeri serta lebih memperlancar program-program pemerintah pusat di Sulawesi Utara serta percepatan pelaksanaan APBD.

Target apa saja yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulut pada masa kerja Bapak?

Secara makro, tercapainya visi Sulawesi Utara yaitu terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan dan Politik, Serta Berkepribadian Dalam Budaya. Secara spesifik makin turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi meningkat melalui bertambahnya infrastruktur dan makin banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Sulawesi Utara serta kemajuan pada sektor-sektor lainnya.

Bagaimana cara menjaga pemenuhan pengelolaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik hingga ke level yang paling rendah? Mengingat biasanya penerapan GCG sangat sulit dilakukan di level terbawah?

Good Governance untuk level terbawah dilakukan pembinaan oleh pejabat eselon 2, 3 dan 4 di perangkat daerah dan dapat dimonitor melalui e-kinerja yang harus diinput oleh setiap pegawai setiap hari. Pembinaan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi minimal dilakukan sebulan 1 kali pada awal bulan, ditambahkan dengan kunjungan *monitoring* dan evaluasi mendadak ke perangkat daerah. ●

PROF DR GAGARING PAGALUNG,
GURU BESAR FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pemda Makin Termotivasi Meraih WTP



■ Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof Dr Gagaring Pagalung

Opininya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dinilai sangat penting sebagai tolok ukur kinerja suatu daerah. Hal tersebut seperti diutarakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, Prof Dr Gagaring Pagalung. Prof Gagaring mengatakan, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD menjadi indikator bahwa kinerja dan kesehatan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan pengamatannya, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Prof Gagaring menuturkan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu daerah peraih opini WTP atas LKPD 2018 dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola keuangan. Berikut petikan wawancara dengannya.

Menurut Bapak, seberapa penting opini WTP atas LKPD yang diraih pemerintah daerah?

Opini WTP yang diraih pemerintah daerah merupakan suatu capaian raihan yang menunjukkan pencapaian kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Jika pencapaian baik, misalnya WTP atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian), maka kinerja dan kesehatan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang baik. Sehingga, kelangsungan hidup pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Pada akhirnya, hal tersebut menghasilkan kelangsungan hidup pemerintahan daerah berjalan terus menerus dengan baik karena kondisi keuangan telah menerapkan prinsip pengelolaan *good corporate governance* (GCG) yang baik.

Sebaliknya, jika pencapaian opini yang diraih kurang bagus atau jelek, maka kinerja keuangan menghasilkan kinerja yang tidak optimal dan menunjukkan pengelolaan kesehatan keuangan pemerintah daerah terganggu yang pada akhirnya akan menghasilkan kondisi kesehatan keuangan terganggu atau mengalami hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan *good corporate governance*.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih opini WTP atas LKPD 2018. Menurut pengamatan Bapak, bagaimana komitmen Pemprov Sulsel maupun Kabupaten/kota seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan?

Komitmen pemprov maupun pemkot terhadap raihan opini WTP atas LKPD senantiasa menjadi perhatian utama setiap kepala daerah. Karena, opini WTP bukan hanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan semata, tetapi juga menunjukkan hasil kinerja pemerintah daerah yang dicapai dalam satu tahun anggaran.

Selain kinerja pencapaian, juga menunjukkan kondisi kesehatan keuangan suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu, gubernur, para walikota, bupati termotivasi untuk senantiasa mendapatkan opini WTP atas LKPD daerahnya masing-masing. Adanya motivasi tersebut memungkinkan untuk menjaga kelangsungan kesehatan keuangan pemerintah daerahnya dan pada akhirnya transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dapat tercapai dan semakin hari semakin meningkat raihan tersebut.

Apakah Pemprov Sulsel atau pemerintah kabupaten/kota sering melibatkan kalangan akademisi dan meminta saran dari akademisi terkait peningkatan tata kelola keuangan?

Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah kabupaten/

kota seperti Pemkot Makassar sering melibatkan kalangan akademisi dalam bentuk keterlibatan menjadi narasumber, meminta saran, atau melibatkan secara tidak langsung dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan. Hasil yang dicapai Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar dalam pencapaian kinerja pengelolaan keuangan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk raihan opini WTP menunjukkan pemprov dan pemkot telah menjalin kerja sama yang baik dan menjadikan kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan kinerja keuangan dan kesehatan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Hal apa yang menurut Bapak yang masih harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah di Sulsel terkait pengelolaan keuangan?

Pengamatan kami, yang masih menjadi kendala di Sulsel terkait dengan pengelolaan keuangan adalah terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya keuangan aparat pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya staf yang berlatar belakang pendidikan keahlian keuangan dan akuntansi aparat masih sedikit. Sehingga, penguasaan dasar pengelolaan keuangan dan akuntansi masih perlu dikembangkan. Implikasi dari kurangnya ahli keuangan dan akuntansi aparat turut pula memengaruhi pengelolaan tata kelola keuangan dengan baik dalam suatu pemerintah daerah.

Selain itu, tingkat *awareness* pengelolaan keuangan dengan prinsip GCG pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD), pada setiap pemerintah daerah relatif masih kurang. Prinsip pengelolaan keuangan yang hanya mengandalkan pada OPD keuangan (BPKD misalnya), menjadi salah satu kelemahan pengelolaan keuangan yang semestinya dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi satu sama lainnya, sehingga harmonisasi pengelolaan keuangan di semua level OPD dapat menghasilkan pengelolaan atau tata kelola keuangan yang menghasilkan GCG yang pada akhirnya menghasilkan kinerja dan kesehatan keuangan yang maksimal dan berkelanjutan.

Bagaimana penerapan pola *good corporate governance* di Sulsel?

Pengelolaan pola GCG Sulsel saat ini menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik. Upaya ini terlihat dari tingginya komitmen Gubernur Sulsel dan beberapa kepala daerah pemkot/pemkab terhadap pengelolaan keuangan dengan komitmen peningkatan kapasitas pengetahuan keuangan dan akuntansi bagi aparat sumber daya manusia keuangan dan upaya jalinan kerja sama dengan akademisi, khususnya akademisi keuangan yang semakin meningkat. ●



Pengelolaan pola GCG Sulsel saat ini menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Solowi Resto

Konsisten dalam Rasa dan Kualitas



■ Solowi Resto



■ Solowi Resto

Alindri selalu menjaga dan mengatur 10 pegawai yang bekerja saat ini bisa memberikan usaha maksimal.

Memiliki bisnis di tengah kesibukan rutinitas pekerjaan tak lagi aneh pada zaman sekarang ini. Setiap orang dituntut untuk fleksibel dan kreatif dalam memanfaatkan waktunya. Dengan begitu, usia kerja dapat digunakan dengan lebih produktif.

Pintar melihat peluang adalah salah satu kunci dari membangun sebuah bisnis, seperti yang dilakukan oleh Alindri Perwita Sari (43 tahun). Sehari-hari, perempuan yang akrab disapa Alindri ini merupakan seorang pegawai di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Di tengah tugasnya sehari-hari sebagai arsiparis madya di BPK Pusat, Alindri pintar melihat peluang bisnis

dengan menjalankan sebuah restoran di daerah kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat.

Restoran yang bernama Solowi Resto ini menawarkan konsep tempat makan Jawa klasik namun memberikan kesan mewah. Usaha yang dia rintis bersama keluarga ini berawal dari kejeliannya melihat peluang bisnis kuliner. Kepada tim *Warta Pemeriksa*, Alindri menceritakan beberapa alasan mengapa akhirnya tertarik dengan bisnis kuliner.

Pertama, kata dia, usaha kuliner merupakan bisnis yang menjanjikan jika dijalani dengan serius. Karena setiap orang perlu makan. Apalagi jika makanan tersebut memiliki cita rasa yang menggugah selera dan membuat orang ingin makan lagi dan lagi.

Kehidupan di kota besar yang menuntut rutinitas kerja yang padat juga membuat banyak keluarga gemar mencari makan di luar. "Jika restoran dapat menyajikan makanan enak dan suasana nyaman, tentu akan membuat pelanggan ingin datang kembali," kata dia.

Alasan kedua adalah kegemarannya beserta keluarga mencari hidangan khas Solo di sekitar Jakarta. Bersama keluarga, Alindri seringkali merasa bosan, dengan makanan Solo yang rasanya tidak sesuai harapan dan menunya selalu sama.

Karenanya, bersama keluarga, dia memutuskan untuk membuat sebuah restoran yang dinamai Solowi Resto yang menawarkan makanan khas Solo. Mulai dari tengkleng, babat gongso, tongseng daging, satai kambing, dan iga bakar. Di tempat ini, tengkleng merupakan menu favorit karena tidak banyak yang menjual di sekitaran Jakarta.

"Kalaupun ada terkadang rasanya tidak seperti yang ada di Solo dan itu pun agak sulit mencarinya. Di Solowi, kita menawarkan berbagai jenis tengkleng, mulai dari tengkleng solowi alit, tengkleng solowi ageng, tengkleng otak, tengkleng sum-sum, tengkleng sengkel, hingga tengkleng rica gongso," papar dia. Menu andalan lainnya selain kambing adalah bakmi



Jawa, ayam kampung ingkung, dan berbagai macam sambal.

Yang menariknya, kata dia, sebagian pengunjung yang datang ke Solowi Resto tidak tahu tengkleng. Tetapi setelah mencoba, mereka justru jatuh cinta kepada makanan ini dan menjadi pelanggan setia. "Setiap orang yang pertama kali datang biasanya tanya, 'Apa sih tengkleng itu?' Tapi setelah dijelaskan dan mereka cicipi sendiri, akhirnya malah ketagihan dan balik lagi," tutur Alindri.

Tempat makan khas solo ini buka dari pukul 10.00-20.00. Namun Alindri mengatakan terkadang ada juga pelanggan yang memesan agar buka lebih awal atau tutup lebih larut. Biasanya, pelanggan yang selesai bermain golf yang berlokasi tak jauh dari restoran.

Sering test food

Alindri menjelaskan, seperti bisnis lainnya, restoran ini tidak langsung ramai pengunjung. Awalnya justru harus dijalani dengan jatuh bangun. Misalnya saja soal menu yang sejak dirintis sering berganti-ganti. Jumlah dan jenis menu pasti terseleksi oleh minat pelanggan.

Padahal, untuk menentukan menu bukan hal yang mudah dan murah. Resep menu tersebut memerlukan biaya yang lumayan tinggi. Jika ada makanan yang tidak sesuai standar maka Alindri tidak segan untuk membuangnya.

Hal ini karena Alindri selalu ada ketika melakukan *test food*. Justru, ini merupakan momen yang paling penting dan harus terus dilakukan agar cita rasa makanan yang disajikan di Solowi Resto tetap sesuai standar meski berkali-kali dibuat.

"Kita menjaga *banget* konsistensi rasa. Jadi kita sering *test food*. Kita berani buang makanan kalau memang itu tidak sesuai standar kita. Jadi *cost* yang harus kita tanggung kadang-kadang kita rugi. Tapi daripada pelanggan kecewa, *mending* saya yang rugi," tuturnya.

Kesulitan lain adalah mendapatkan bahan baku yang berkualitas atau sesuai standar. Terkadang ada penyedia bahan baku yang tidak konsisten dalam menjaga kualitas bahan. Hal ini cukup membuat kesulitan untuk menjaga konsistensi masakan. "Kita besarnya mungkin baru sejak 2016, ya. Karena kita ketika awal itu mencari-cari menu yang pas," jelas dia.

Hal lain yang menjadi perhatian Alindri adalah pegawai. Dia selalu menjaga dan mengatur 10 pegawai yang bekerja saat ini bisa memberikan usaha maksimal. Untuk membangun kepercayaan pegawai, Alindri mencoba bersikap *royal*. Hal ini dilakukan karena dia tidak bisa setiap hari berada di lokasi.

Dia juga menekankan kepada pegawainya untuk ketat melakukan *test food* terhadap setiap menu. Jika rasa dan kualitasnya tidak sesuai maka mereka harus berani mengganti dengan yang baru.

Meski membutuhkan perjuangan yang besar, Alindri merasa bahwa berbisnis sangat menyenangkan. Yaitu ada hal yang di luar rutinitas pekerjaan utamanya.

Tantangan dalam berbisnis membuatnya merasakan adrenalin yang membuat hidupnya lebih berwarna. "Menyenangkan bisnis itu. Ada sesuatu yang tidak rutin, ada sesuatu yang menantang, membuat hidup lebih hidup," ujarnya.

Kepada mereka yang ingin mencoba berbisnis, Alindri memberikan sedikit tips dari pengalamannya. Yang terpenting adalah niat yang kuat dan jangan terburu-buru ingin cepat besar. Semuanya harus dilakukan dari hal kecil.

Yang tak kalah penting juga adalah jangan takut rugi mengingat semua usaha membutuhkan proses. "Naik turun adalah hal yang biasa dalam bisnis. Selagi kita tekun, lama-lama bisnis itu akan menjanjikan dan kelak bisa menjadi investasi di usia-usia pensiun sebagai pegawai," papar Alindri. ●



■ Menu-menu khas Solo

Kepedulian Sosial Ikatan Istri Anggota BPK

Beberapa kegiatan sosial yang dilakukan Ikistra adalah memberikan bantuan pendidikan murid, santunan anak yatim piatu, bantuan kepada guru-guru taman kanak-kanak di Kompleks BPK, penyelenggaraan peringatan hari anak, dan bantuan kepada para janda pensiunan pegawai BPK.

Ikatan Istri Anggota (Ikistra) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk bukan sekadar untuk sarana silaturahmi. Ikistra juga sangat sering melakukan kegiatan sosial mulai dari pemberian bantuan pendidikan hingga menyantuni anak yatim piatu.

Pada pertengahan Juni 2019, misalnya, Ikistra bersama Dharma Wanita Sekretariat Jenderal BPK memberikan bantuan pendidikan murid tahun 2019 kepada putra-putri dari pegawai BPK di kantor pusat dan kantor perwakilan.



■ Penyerahan Bantuan Pendidikan Murid oleh Ikistra, 3 Juli 2019.

Disaksikan oleh Anggota V BPK Isma Yaton, bantuan tersebut diterima Kepala Badan Diklat PKN BPK dan delapan kepala perwakilan untuk disampaikan kepada pegawai yang berhak di unit kerjanya masing-masing.

Ibu Bahrullah Akbar (istri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar) sebagai wakil dari Ikistra mengatakan, bantuan pendidikan murid disalurkan di seluruh kantor perwakilan dan Badan Diklat

PKN dengan kriteria tertentu. "Kriteria yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah putra-putri dari satuan pengamanan, supir dan pelayan kantor, untuk tingkat pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau yang sederajat," kata Ibu Bahrullah

Untuk saat ini, bantuan hanya diberikan kepada satu anak tertua yang masih menempuh pendidikan untuk satu keluarga. Dana bantuan berasal dari berbagai sumber, seperti sumbangan pegawai, basis BPK, kas DWP Sekretariat Jenderal BPK, dan sumbangan dari Ibu-ibu Ikistra.

Anggota V BPK Isma Yaton berharap kegiatan penyaluran bantuan pendidikan murid terus berlangsung. "Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan segera dapat disalurkan kepada yang berhak dan kepada Ikistra diharapkan sumbangan yang diberikan dapat bertambah, sehingga jumlah penerima dalam satu keluarga dapat bertambah tidak hanya satu anak dalam keluarga", kata Anggota V BPK.

Anggota V mengucapkan terima



■ Anggota V BPK, Isma Yaton



■ Penyerahan Bantuan Pendidikan Murid oleh Ikistra BPK kepada karyawan BPK Perwakilan, 13 Juni 2019.

dalam sambutannya mengatakan, beberapa kegiatan ibu-ibu IKISTRA BPK yang turut dilaksanakan pada saat ini antara lain bantuan kepada guru-guru taman kanak-kanak di Kompleks BPK, penyelenggaraan peringatan hari anak, dan bantuan kepada para janda pensiunan pegawai BPK.

Kegiatan bantuan pendidikan murid sebelumnya dikelola oleh Dharma Wanita Sekretariat Jenderal BPK dengan memberikan bantuan kepada putra-putri pegawai BPK di kantor pusat dan kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah sumbangan yang terkumpul, maka bantuan ini disepakati untuk diperluas lingkup penerima yang berhak, menjadi putra-putri pegawai BPK di seluruh kantor BPK Perwakilan.

Anggota V BPK Isma Yatun dalam kesempatan tersebut mengatakan, dengan diteruskannya bantuan pendidikan murid ini, maka seluruh Kantor BPK Perwakilan Indonesia telah menerima bantuan tersebut. "Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena telah dapat memberikan bantuan ini tidak hanya di kantor pusat BPK, tetapi ke seluruh Kantor BPK Perwakilan. Ibu-ibu IKISTRA telah juga memberikan contoh kepada kami untuk dapat berbagi," kata Isma Yatun.

Adapun pada bulan Ramadhan lalu, Ikistra dan DWP Setjen BPK menginisiasi acara buka puasa bersama pegawai BPK pada Sabtu (18/5). Selain buka puasa bersama pegawai, BPK juga mengundang anak-anak yatim dan dhuafa serta memberikan santunan kepada mereka.

Acara tersebut dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, di Jakarta. Segenap pegawai dan pejabat di lingkungan BPK tampak membaur dengan sejumlah anak yatim yang hadir. Dalam buka puasa bersama tersebut hadir Anggota II BPK Agus Joko Pramono beserta istri. Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif beserta istri dan pejabat serta pegawai di lingkungan BPK. ●



■ Ikistra berfoto bersama para Kepala Perwakilan BPK.



■ Ibu Moermahadi Soerja Djanegara

kasih serta penghargaan kepada Ikistra dan DWP Sekretariat Jenderal BPK atas kegiatan-kegiatan yang dapat membantu pegawai di lingkungan BPK, khususnya dalam biaya pendidikan putra-putri pegawai.

Tak lama berselang, tepatnya 3 Juli 2019, Ikistra dan Dharma Wanita Sekretariat Jenderal BPK kembali menyerahkan bantuan pendidikan murid. Acara berlangsung di Auditorium Kantor Pusat BPK.

Kali ini, bantuan diserahkan langsung oleh Ibu Moermahadi Soerja Djanegara (istri Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara) dan Ibu Agus Joko Pramono (Istri Anggota II Agus Joko Pramono) kepada 26 kepala perwakilan yang disaksikan Anggota V BPK Isma Yatun.

Ibu Moermahadi Soerja Djanegara



■ Ibu Bahrullah Akbar

BPK Mulai Terapkan Konsep *Green Building*



■ Kepala Biro Umum BPK Sudarminto Eko Putra



■ Peninjauan Fasilitas Kantor BPK dihadiri oleh Ketua BPK, Sekjen BPK dan Pejabat Struktural BPK, 27 Desember 2018.

Penerapan konsep *green building* menciptakan efisiensi dari segi konsumsi listrik hingga ratusan juta rupiah.



■ Ruang kerja pegawai BPK



■ Mesin Face ID



■ Taman biopori di BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menerapkan konsep *green building* dalam pembangunan sarana dan prasarana (sarpras). Selain menciptakan efisiensi, penerapan konsep *green building* sebagai wujud kepedulian BPK terhadap lingkungan.

Kepala Biro Umum BPK Sudarmino Eko Putra mengatakan, sebagian aspek dari konsep bangunan ramah lingkungan sebagian telah dijalankan, di antaranya adalah *eco-office*. Sudarmino menuturkan, dengan menerapkan *eco-office*, biro umum telah mampu melakukan penghematan-penghematan di BPK secara signifikan.

Eco-office salah satunya diterapkan dengan cara mengganti lampu-lampu model lama dengan lampu LED yang menggunakan daya listrik lebih kecil, namun memiliki daya penerangan yang maksimal. Begitu juga dengan pendingin ruangan (AC). Biro Umum melakukan penggantian dengan AC yang ramah lingkungan.

"Seperti kita tahu semakin banyak *outdoor AC*, maka suhu udara di luar akan semakin panas. Tentu ini memengaruhi kualitas udara alam, kemudian juga akan memakan semakin banyak daya listrik yang dibutuhkan," kata Sudarmino kepada *Warta Pemeriksa*.

BPK, kata dia, kini menggunakan satu *outdoor AC* yang bisa digunakan untuk beberapa AC. "Biasanya *kan* satu *outdoor AC* hanya bisa digunakan untuk satu AC," katanya.

Penerapan *eco-office* menciptakan efisiensi yang cukup besar dari sisi konsumsi listrik. Pada 2018, ujar dia, BPK bisa menghemat pengeluaran listrik hingga Rp337 juta. Bahkan, menurutnya, jika dibandingkan tahun 2016, nilai penghematannya jauh lebih besar.

Konsep *eco-office* sudah diterapkan di berbagai gedung di lingkungan kantor BPK Pusat, salah satunya adalah Menara 7. Di kantor perwakilan, salah satu yang sudah menerapkan konsep tersebut adalah Kantor Perwakilan di Maluku. Saat ini, BPK Perwakilan Kali-

mantan Utara berencana untuk menerapkan *eco-office*.

"Di sana masih sedang proses pembangunan gedung baru, sehingga direncanakan akan menerapkan konsep *eco-office*," katanya.

Selain menerapkan *eco-office*, Biro Umum mengaplikasikan biopori di semua lingkungan BPK Pusat. Menurut Eko, tanah-tanah dan taman-taman yang ada di lingkungan BPK telah menggunakan biopori. Biopori, ujar dia, memiliki fungsi untuk resapan air tanah. "BPK juga sudah tidak menggunakan air tanah. Kami saat ini sudah menggunakan air PDAM," ujarnya.



Biopori yang ada di BPK ke depannya akan dimanfaatkan menjadi sumber air di lingkungan.

la menambahkan, biopori yang ada di BPK ke depannya akan dimanfaatkan menjadi sumber air di lingkungan. Caranya dengan memanfaatkan air hujan yang ditampung melalui resapan menggunakan sistem daur ulang air. Menurut dia, jika resapan yang dibuat dapat menampung 10 meter kubik air hujan, selama bertahun-tahun air tersebut akan dapat digunakan lagi dengan cara didaur ulang.

Bagi Eko, konsep itu lebih ramah lingkungan karena menggunakan sistem daur ulang air, bahkan dapat terbarukan dengan air hujan yang baru, Namun, untuk menjalankan rencana daur ulang air ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Akan kita coba ajukan anggaran di tahun 2020. Jadi 2020 itu benar-benar ekonomis. Karena air yang digunakan itu 10 meter kubik ya 10 meter kubik

itu saja, bahkan akan terbarukan lagi dengan air hujan yang baru".

Sistem keamanan

Selain secara perlahan menerapkan konsep *green building*, Biro Umum BPK akan meningkatkan sistem keamanan dengan mengaplikasikan *face ID*. Sistem tersebut akan mendeteksi wajah dari orang-orang yang melewati pintu masuk ke berbagai tempat di area BPK Pusat.

"Sehingga, seseorang yang masuk ke berbagai tempat di lingkungan BPK akan terdeteksi melalui wajahnya apakah ia merupakan bagian dari BPK ataukah orang luar," katanya.

Dia menjelaskan, sistem keamanan yang saat ini diterapkan memang telah memberlakukan bahwa tamu hanya bisa pergi ke tempat yang sudah ditentukan dengan kartu identitas khusus tamu dan hanya bisa ke satu tempat. Akan tetapi, masih adanya tamu yang menempel kepada pegawai BPK untuk dapat mengakses berbagai tempat yang ada di BPK, membuat hal tersebut menimbulkan cela bagi orang luar BPK untuk melanggar keamanan di lingkungan BPK.

"*Face ID* akan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran bagi orang-orang yang tidak memiliki akses izin di area-area BPK. *Face ID* rencananya akan diterapkan ke semua pegawai, termasuk *office boy* di BPK. Saat ini, *face ID* telah diuji coba di ruang CCTV Biro Umum," ujarnya.

la juga berharap nantinya *face ID* menjadi sistem absen otomatis. Soalnya, kata dia, ada beberapa kejadian yang ia lihat ketika ada beberapa pegawai yang datang terlambat, sebagian dari mereka tidak terekam oleh bagian SDM. Hal tersebut disebabkan karena sebagian dari mereka ada yang masuk kantor, namun tidak melakukan absensi terlebih dahulu.

"Permasalahan absen seperti ini cukup banyak terjadi. Oleh karena itu diharapkan *face ID* dapat terintegrasi langsung dengan absen kehadiran pegawai di lingkungan kantor BPK," ujarnya. ●



**Penghargaan
Pengelolaan JDIH
Terbaik Tahun 2015**

diberikan oleh
BADAN PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL



**Penghargaan
Pengelolaan JDIH
Terbaik Tahun 2017**

diberikan oleh
BADAN PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL



**Penghargaan
Pengelolaan JDIH
Terbaik Tahun 2018**

diberikan oleh
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menjaga Hubungan Baik dengan Media Massa

Hal ini terkait peran media sebagai corong informasi yang menyebarkan berita dan peristiwa ke masyarakat di Tanah Air.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengadakan acara halal bihalal dengan rekan-rekan media massa yang berlangsung di kantor BPK pusat, Jakarta, Selasa 18 Juni 2019. Acara yang dihadiri perwakilan sekitar 16 media massa cetak, *online* dan TV tersebut dibuka oleh Juska Meidy Enyke Sjam selaku kepala biro humas dan kerja sama internasional.

Juska menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai upaya menjaga silaturahmi antara institusi BPK dan para wartawan dari media massa. Hal ini terkait peran media sebagai corong informasi yang menyebarkan berita dan peristiwa ke masyarakat di Tanah Air.

Karenanya, dalam kesempatan tersebut dia menjelaskan informasi terkait ke BPK kepada teman-teman media. Di antaranya terkait struktur, tanggung jawab, serta sistem kerja BPK.

Kemudian selain informasi terkait ke BPK-an, Juska juga menjelaskan mengenai hubungan yang harus dibangun antara BPK dan para wartawan dari media massa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Hal ini sangat penting agar wartawan selalu melakukan konfirmasi terkait laporan berita atau isu terkait dengan BPK.

"Jangan sampai laporan yang dikeluarkan ada yang tidak dikonfirmasi ke kita. Intinya kita ingin menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman media," kata Juska.

Sri Haryati selaku kepala bagian pengelolaan informasi yang juga turut hadir dalam acara ini menambahkan, ada beberapa informasi yang masih keliru disebarkan oleh rekan-rekan wartawan. Khususnya informasi mendasar seperti penulisan ketua BPK.

Menurut dia, masih ada beberapa artikel atau berita yang menuliskan Ketua BPK menjadi Kepala BPK. Walaupun hanya satu kata, namun satu kata ini dapat mengubah makna. Karena penulisan yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi BPK.

"Pemimpin tertinggi di dalam institusi BPK adalah ketua bukan kepala. Istilah kepala hanya digunakan untuk jabatan-jabatan yang bertanggung jawab pada bagian-bagian tertentu. Seperti kepala perwakilan, kepala biro, dan jabatan-jabatan tersebut secara struktural berada di bawah ketua



■ Wakil Ketua BPK RI



■ Kepala Biro Humas dan KSI BPK RI (kiri) dan Kepala Bagian Pengelolaan Informasi BPK RI (kanan).

BPK," ujar dia.

Karenanya, dia berharap rekan wartawan tetap selalu menjaga hubungan dengan institusi BPK. Dengan begitu, tidak ada kekeliruan informasi dan penulisan narasumber dari BPK.

Dia juga menjelaskan bahwa tidak semua informasi dapat langsung dibagikan kepada media massa. Ada beberapa informasi yang dikecualikan. Misalnya saja hasil pemeriksaan yang telah disampaikan ke penegak hukum yang tidak bisa dibagikan langsung oleh BPK.

Hal ini karena informasi tersebut akan ditangani oleh instansi penegak hukum yang bersangkutan. Tujuannya, agar proses penegakan hukum yang sedang berjalan tidak terganggu dan dapat berjalan hingga tuntas.

BPK juga menginformasikan bahwa wartawan bisa mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK dengan mengaksesnya ke sistem pemantauan aplikasi informasi pengaduan (Sipadu). Kemudian juga melalui *media center*, serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Dalam acara halal bihalal tersebut, hadir pula Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar melakukan ramah tamah dengan wartawan. ●

BPK Bersiap Lakukan Pemeriksaan Pendahuluan PFM

PFM mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan negara/ daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan *Workshop I* Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan Tematik Kinerja *Public Financial Management* (PFM) Tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari (1–3 Juli 2019) di Jakarta itu digelar untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup kepada tim pemeriksa.

Anggota V BPK Isma Yaton dalam pengarahannya mengatakan, pemeriksaan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan tematik PFM ini adalah jenis pemeriksaan kinerja, yang pada saat ini baru pada tahap persiapan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan bertujuan mengidentifikasi masalah yang ada pada obyek pemeriksaan sebagai bahan untuk menentukan tujuan dan lingkup pemeriksaan.

PFM mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan negara/daerah. Dalam pendekatan *the whole of system*, PFM melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah dan lembaga perwakilan dalam upaya untuk mengidentifikasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Namun demikian, pemerintah memiliki kendala untuk dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan publik dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat secara efektif



mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, kata Isma, BPK diharapkan dapat bergerak cepat dan maju. “Sehingga dapat memberikan penilaian sejauh mana PFM terutama di pemerintah daerah telah dapat menjamin alokasi sumber daya keuangan daerah yang optimal dan menjamin pelayanan publik yang efektif dan efisien,” ujar Isma Yaton.

Isma Yaton tak lupa mengingatkan agar setiap pemeriksa BPK dalam melaksanakan pemeriksaan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi dan Profesionalisme. “BPK tanpa nilai-nilai dasar tersebut tidak berarti apa-apa dan rakyat tidak akan menaruh kepercayaan apalagi harapan kepada BPK. Oleh karena itu saya harap nilai-nilai dasar BPK itu harus mendarah daging dan jadi napas kita semua”, tegas Isma Yaton. Anggota V BPK.

Selain Anggota V, turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara V Bambang Pamungkas, Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Syamsudin, para Kepala Perwakilan BPK, dan para pemeriksa di lingkungan AKN V dan VI. ●



■ Anggota V BPK, Isma Yaton memberikan pengarahan.



Direktorat Jenderal Pajak
Kanwil DJP Jakarta Pusat
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

TAXPAYER AWARDS 2019

Diberikan Kepada :

BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI

NPWP 00.012.137.6-077.000

sebagai:

WAJIB PAJAK BENDAHARA

dengan Kontribusi-Penerimaan dan Kepatuhan Pelaporan Terbaik
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun 2018

Jakarta, 2 April 2019
Kepala KPP



Mokhamad Khifni



KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA

TAXPAYER AWARDS 2019

Diberikan kepada :

BENDAHARA PENGELUARAN BPK R.I.

KATEGORI :

Wajib Pajak Bendahara
Kontribusi Pembayaran dan
Kepatuhan Pelaporan Terbaik

Standar Kompetensi Jabatan ASN



■ OLEH **PRAMUDHITA PUTERI**
Subag Penilaian Kompetensi
Biro Sumber Daya Manusia
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Standar kompetensi manajerial BPK terdahulu mengukur kompetensi *information seeking, analytical thinking, conceptual thinking, strategic thinking*, dan *creativity & innovation* secara terpisah.

Pemerintah menetapkan standar kompetensi jabatan ASN bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Indonesia, termasuk PNS melalui Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Standar kompetensi jabatan tersebut tidak hanya mengatur mengenai standar kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis tetapi juga memberikan pedoman mengenai ikhtisar dan persya-

ratan jabatan dalam ketentuan tersebut sebagaimana tergambar dalam skema di bawah ini. Sementara standar kompetensi manajerial dan sosial kultural wajib dipenuhi oleh PNS, masing-masing instansi diberikan kebebasan untuk menyusun standar kompetensi teknis, untuk kemudian disahkan oleh Kemenpan & RB.

Tulisan ini merupakan salah satu seri dalam rangkaian artikel terkait penilaian kompetensi berikutnya. Sebelum membahas dampak ketentuan tersebut, mari kita bahas delapan kompetensi





manajerial dan satu kompetensi sosial kultural yang menjadi standar bagi PNS. Dari delapan kompetensi manajerial, hanya satu kompetensi yang menasar area intelektual yaitu kompetensi pengambilan keputusan. Kompetensi tersebut menasar kemampuan mencari informasi, menganalisis, menentukan solusi, dan berpikir strategis. Kompetensi pengambilan keputusan dirancang untuk menasar sejumlah kompetensi intelektual yang biasanya diukur sebagai suatu entitas independen. Standar kompetensi manajerial BPK terdahulu mengukur kompetensi *information seeking, analytical thinking, conceptual thinking, strategic thinking, dan creativity & innovation* secara terpisah.

Dua kompetensi manajerial ASN yang menasar area pengelolaan diri dan pekerjaan, yaitu integritas dan orientasi pada hasil. Kedua kompetensi tersebut tidak hanya menasar pada tataran diri pribadi, tetapi juga orang lain dengan menjadi motor penggerak atau panutan bagi lingkungan kerjanya. Kompetensi integritas sebelumnya disasar BPK dengan kompetensi *integrity*. Sebagaimana pengukuran kompetensi *integrity* di BPK, pengukuran kompetensi integritas berdasarkan Permenpan tidak mengukur perilaku berintegritas versus tidak berintegritas. Kompetensi integritas menasar sejauh mana seorang menerapkan perilaku berintegritas mulai dari diri sendiri hingga memfasilitasi orang-orang dalam organisasi untuk menerapkannya.

Kompetensi integritas menjadi poin utama yang ditekankan sebagai PNS namun pengukur-

annya tidak mudah. Metode evaluasi selain penilaian kompetensi diperlukan untuk memastikan implementasinya dalam praktik kerja sehari-hari. Sebagian organisasi menjadikan integritas sebagai nilai dasar organisasi, bukan kompetensi. Oleh karena itu, organisasi tidak menilai integritas dengan proses penilaian kompetensi. Selama ini, pengukuran integritas sebagai kompetensi di BPK juga menuai pro dan kontra. Ketentuan kompetensi ASN ini tak ayal menasbihkan pengukuran integritas sebagai suatu entitas kompetensi.

Sementara itu, kompetensi orientasi pada hasil menasar pada kompetensi *achievement orientation, initiative, planning & execution, dan concern for order* yang ada di BPK. Dengan demikian, kompetensi orientasi pada hasil fokus pada siklus pengelolaan pekerjaan, mulai dari penentuan target kerja, implementasi, dan pemantauannya.

Tiga kompetensi yang menasar area bekerja dengan orang lain adalah kerja sama, komunikasi, dan pelayanan publik. Ketiga kompetensi tersebut menasar kemampuan individu dalam bekerja bersama hingga memfasilitasi lingkungan kerjanya untuk menciptakan suasana kolaboratif, komunikatif, dan mendukung pelayanan publik. Tiga kompetensi tersebut di atas dimiliki oleh BPK namun dalam bentuk yang berbeda. Kompetensi kerja sama selaras dengan kompetensi *teamwork & cooperation* dan *team leadership*. Kompetensi komunikasi selaras dengan kompetensi *impact & influence* dan *organizational awareness*. Sementara itu, kompetensi pelayanan publik selaras dengan kompetensi *customer service orientation* dan *independent*.

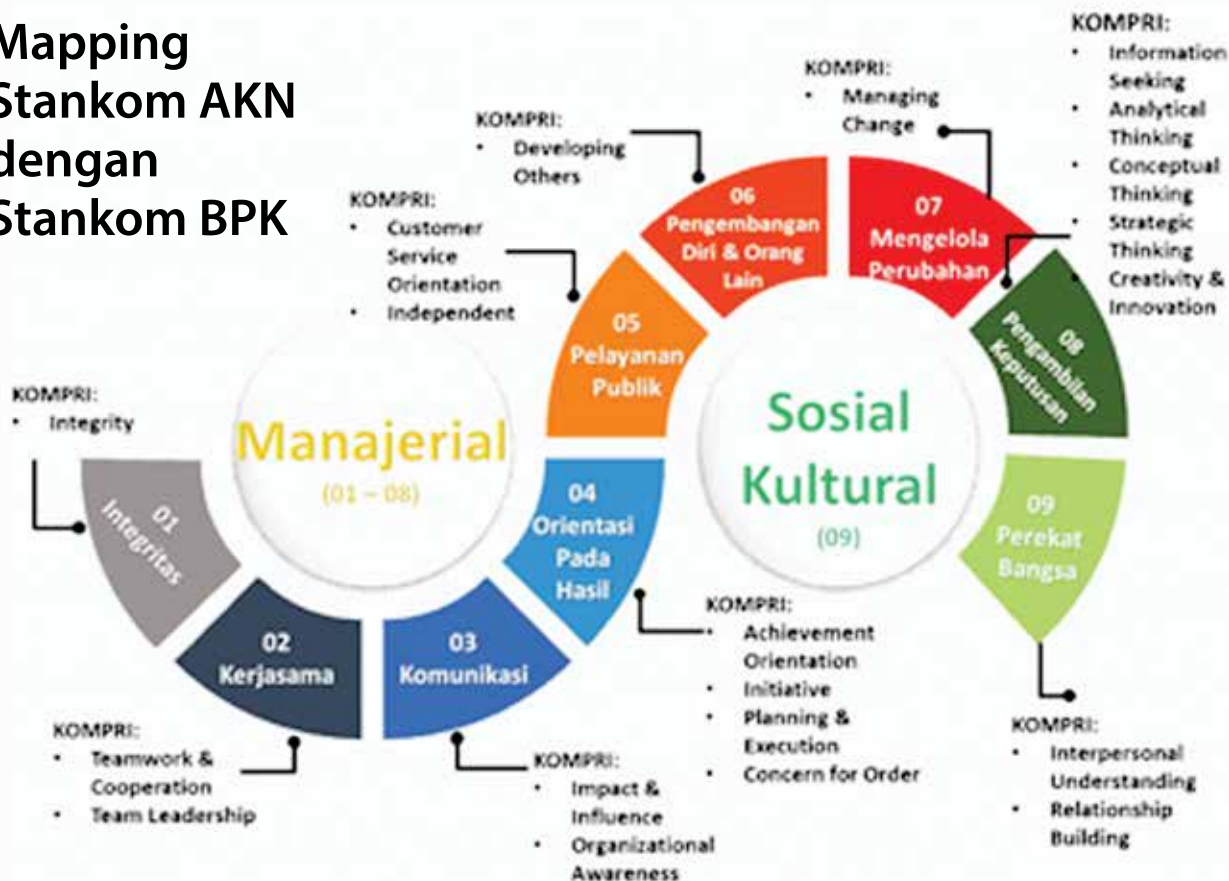
Dua kompetensi yang menasar area bekerja melalui orang lain adalah mengelola perubahan serta pengembangan diri dan orang lain. Kedua kompetensi tersebut menasar kemampuan individu dalam mendorong maupun memfasilitasi orang lain untuk mengembangkan kemampuannya serta mengimplementasikan tuntutan perubahan organisasi. Kompetensi mengelola perubahan erat kaitannya dengan kompetensi *managing change*. Sementara kompetensi pengembangan diri dan orang lain berhubungan dengan kompetensi *developing others*.

Selain kompetensi manajerial, kompetensi khas yang harus dimiliki PNS adalah kompetensi perekat bangsa. Kompetensi ini diharapkan dimiliki oleh PNS agar dapat menjadi agen perekat dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Kompetensi tersebut menasar kemampuan ASN dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Kompetensi manajerial BPK yang erat kaitannya dengan kompetensi ASN adalah *interpersonal understanding* dan *relationship building*. Berikut infografis yang menunjukkan relasi antara standar kompetensi ASN dan BPK.

Secara umum, seluruh kompetensi manajerial yang dimiliki BPK terakomodir dalam kompetensi manajerial ASN. Namun demikian, fakta penting lainnya adalah satu kompetensi ASN mengukur sejumlah kompetensi yang ada di BPK. Hal ini menunjukkan bahwa satu kompetensi diukur dengan beberapa parameter atau fokus. Beberapa parameter atau fokus tersebut tidak semuanya sepadan (*apple to apple*). Jadi, fokus LEVEL kompetensi manajerial BPK adalah "kedalaman" sementara kompetensi manajerial ASN adalah "keluasan". Kondisi ini menuntut proses pengukuran yang berbeda sehingga perlu memperhatikan sejumlah indikator dan penyesuaian metode penilaian kompetensi yang berbeda. Proses penilaian kompetensi tersebut butuh kehati-hatian dan penyesuaian metode karena indikator penilaian yang beragam.

Selain kompetensi, ASN juga menetapkan standar kompetensi yang merupakan acuan pemenuhan level kompetensi pada posisi atau jabatan tertentu. Standar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Mapping Stankom AKN dengan Stankom BPK



Jenis Kompetensi	Nama Kompetensi	Jabatan Pimpinan Tinggi			Jabatan Administrasi			JF Keahlian			JF Keterampilan				
		Utama	Madya	Pratama	Administrator	Pengawas	Pelaksana	Utama	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Pemula
Manajerial	Integritas	5	5	4	3	2	1	5	4	3	2	3	2	2	1
	Kerjasama	5	5	4	3	2	1	4	4	3	2	3	2	2	1
	Komunikasi	5	5	4	3	2	1	4	4	3	2	3	2	1	1
	Orientasi Pada Hasil	5	5	4	3	2	1	4	4	3	2	3	2	1	1
	Pelayanan Publik	5	5	4	3	2	1	4	4	3	2	3	2	1	1
	Pengembangan Diri & Orang Lain	5	5	4	3	2	1	4	4	3	2	3	2	1	1
	Mengelola Perubahan	5	5	4	3	2	1	4	4	3	2	3	2	1	1
	Pengambilan Keputusan	5	5	4	3	2	1	4	4	3	2	3	2	1	1
Sosial Kultural	Perekat Bangsa	5	5	4	3	2	1	5	4	3	2	3	2	2	1

Standar kompetensi ASN hanya membedakan level pemenuhan untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. Level pemenuhan kompetensi dibuat seragam untuk seluruh instansi/ lembaga pemerintahan. Artinya standar kompetensi ASN belum mempertimbangkan kekhasan organisasi yang tergambar pada perbedaan tugas dan fungsi suatu posisi atau jabatan tertentu meskipun berada pada nomenklatur jabatan yang sama. Contohnya adalah jabatan Kepala Auditorat dan Kepala Biro. Kedua jabatan tersebut tergolong dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dengan syarat standar kompetensi yang sama levelnya. Padahal, sifat pekerjaannya berbeda sehingga berpotensi memiliki level penguasaan kompetensi yang berbeda. Kekhasan tersebut tidak tergambar dalam standar kompetensi ASN.

Selain itu, level kompetensi yang distandarkan untuk jabatan fungsional keahlian pertama dan jabatan keterampilan mahir sama dengan jabatan administrasi pengawas yang setara dengan Eselon IV. Padahal pekerjaan jabatan fungsional pada level tersebut fokus pada pekerjaan individual. Berbeda dengan pekerjaan jabatan administrasi pengawas yang fokus pada manajemen tugas dan sumber daya. Dengan demikian, sifat pekerjaan tersebut tidak tergambar dalam level kompetensi yang disyaratkan.

Peraturan standar kompetensi jabatan ASN ini tak pelak menuntut seluruh instansi pemerintah untuk menyesuaikan dan/atau mengikuti ketentuan tersebut. Bagi BPK yang sudah terlebih dahulu memiliki standar kompetensi manajerial, proses penyesuaian perlu dilakukan dan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, BPK sudah melakukan sejumlah langkah untuk mengadaptasi ketentuan yang baru. BPK (dhi.

Biro SDM) sudah mengundang Kemenpan & RB untuk berkonsultasi terkait substansi dan implementasi standar kompetensi ASN. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, instansi pemerintah diwajibkan mengikuti ketentuan tersebut dengan dua tahun masa transisi. Namun demikian, Kemenpan & RB belum mengatur mengenai metode dan standar penilaian atau pengukuran atas kompetensi ASN. Pun, belum ada instansi pemerintah yang sudah mengimplementasikan ketentuan tersebut secara menyeluruh.

Selanjutnya, BPK menganalisis kompetensi ASN sehingga dapat menghasilkan peta kompetensi BPK yang perlu disesuaikan. Hasil pemetaan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi alat ukur penilaian kompetensi manajerial yang ada. Kemudian, BPK akan mengembangkan alat ukur baru sehingga dapat digunakan untuk menilai kompetensi ASN yang baru. BPK juga melakukan pembekalan berupa *workshop* standar kompetensi ASN dan penyusunan alat ukurnya. Kedua *workshop* tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan bagi Biro SDM untuk mengembangkan alat ukur penilaian kompetensi yang baru.

Hadirnya ketentuan standar kompetensi jabatan ASN bertujuan untuk mewujudkan PNS yang profesional dalam skala nasional. Semangat penyeragaman kemampuan tersebut adalah hal yang positif namun tidak lepas dari kontroversi. Penyeragaman diharapkan dapat membentuk ASN yang profesional di semua lini pemerintahan. Sebelum ketentuan ini dibuat, sejumlah instansi pemerintah sudah menyusun standar kompetensi manajerial/perilaku sendiri. Misalnya BPK, BPKP, dan Kemenkeu. Standar tersebut sudah mereka gunakan sebagai kriteria penilaian dalam proses penilaian kompetensi. Hasil penilaian tersebut juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kenaikan pangkat dan jabatan maupun peran. Proses transisi perlu difasilitasi agar dapat berjalan mulus sehingga tidak merugikan karier pegawai yang bersangkutan maupun kebutuhan organisasi. ●

Informasi Peraturan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

- Permenpan & RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
- SK Sekjen Nomor 380/K/X-XIII.2/10/2009 Tentang Standar Kompetensi Perilaku Pegawai BPK.

Jika pembaca ingin memberikan saran atau masukan maupun memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kompetensi, pembaca dapat menghubungi:
Biro Sumber Daya Manusia — Subbagian Penilaian Kompetensi
(021) 2554 9000 pesawat 1717 dan 1241

MUSEUM BPK RI



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dibentuk berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Selanjutnya dengan penetapan Pemerintah RI No.11/Oem tanggal 28 Desember 1946, BPK RI membuka kantor pertama di Magelang.

Pada waktu pertama kali dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai pegawai 9 orang dan R. Soerasno diangkat sebagai Ketua, Dr. Aboetari diangkat sebagai Anggota dan Djunaedi sebagai Sekretaris yang berfungsi penuh mulai tanggal 1 Januari 1947.

Bangunan yang terletak di sayap kiri gedung Kantor Karesidenan Kedu menjadi kantor pertama Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam upaya BPK RI lebih dikenal di lingkungan masyarakat luas. Pimpinan Badan Periode 1993-1998 bertekad untuk membangun Museum BPK RI yang bertempat di Magelang. Dipilihnya Kota Magelang, karena kota Magelang mempunyai nilai historis yang merupakan tempat pertama kali terbentuknya BPK RI. Pembangunan Museum tersebut diresmikan oleh Ketua BPK RI, Prof. DR. JB. Sumarlin pada 4 Desember 1997.

Kemudian, pimpinan Badan Periode 2014-2019 yang diinisiasi oleh Wakil Ketua

BPK, Spto Amal Damandari, berinisiatif untuk melakukan pengembangan Museum BPK. Pengembangan Museum BPK ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan BPK lebih dekat dengan masyarakat dan juga dengan memperhatikan tren museum post-modern.

Museum BPK RI merupakan salah satu Museum modern di Indonesia yang terletak di kompleks eks Karesidenan Kedu. Jalan Pangeran Diponegoro No 1 Kota Magelang, Jawa Tengah. Museum BPK RI pertama kali diresmikan pada 4 Desember 1997 dengan luas bangunan 163,80 m², kemudian pada tahun 1999 mengalami pengembangan menjadi 260,16 m², dan pada tahun 2016 Museum BPK RI dilakukan perluasan lagi. Kini luas Museum BPK RI menjadi 3.880m².

Hingga kini Museum BPK telah memiliki 14 ruangan, antara lain:

- ❖ Ruang Lobby
- ❖ Ruang *Audiovisual*
- ❖ Ruang Wajah BPK
- ❖ Ruang Titik Nol
- ❖ Ruang Sang Ketua
- ❖ Ruang BPK
- ❖ Ruang Rekam Jejak
- ❖ *Kids Museum*
- ❖ Ruang *Storage*
- ❖ Ruang Perpustakaan
- ❖ *Temporary Exhibition*
- ❖ Ruang Souvenir
- ❖ *Cafeteria*
- ❖ Ruang Kantor



Tidak hanya memiliki visi sebagai pusat pelestarian nilai dan pengetahuan serta hasil kerja BPK yang komunikatif, edukatif, dan kreatif yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Museum ini memiliki beberapa misi, antara lain:

1. Menyelenggarakan pembelajaran tentang tugas, peran, dan sejarah BPK bagi pegawai BPK dan masyarakat umum.
2. Menyebarkan informasi tentang kinerja BPK dalam mengawal pengelolaan keuangan negara melalui pameran dan program-program publik.
3. Melaksanakan riset yang terkait perlindungan, pengembangan, pemanfaatan nilai dan pengetahuan tentang BPK. ●





<<<

Pengarahan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di *Self Assessment* IDI Intosai dengan Itama, 18 Juni 2019.



<<<

Penyerahan LHP LKKL di lingkungan AKN I oleh Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.



<<<

Penyerahan LHP atas LKPD Jawa Tengah Tahun 2018 oleh Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono, 27 Mei 2019.



>>>

Penyerahan LHP atas LKPD
DIY Tahun 2018 oleh
Anggota II BPK RI Agus Joko
Pramono, 28 Mei 2019.



>>>

penyerahan LHP LKKL
di lingkungan AKN III oleh
Anggota III BPK Achsanul
Qosasi.



>>>

Penyerahan LHP atas
Laporan Keuangan
Kementerian ESDM Tahun
2018 oleh Anggota IV BPK RI,
Rizal Djailil.



«««

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 oleh Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil.



«««

Penyerahan LHP atas LKPD Jawa Timur Tahun 2018 oleh Anggota V BPK RI Isma Yatun, 21 Mei 2019.



«««

Penyerahan LHP LKKL di Lingkungan AKN VI oleh Anggota VI BPK Harry Azhar Azis, 24 Juni 2019.



>>>

Halal bihalal Keluarga Besar BPK RI.



>>>

Ikistra saat menghadiri acara buka bersama di Masjid Baitul Hasib BPK RI.



>>>

Foto Bersama Ikistra dengan Darma Wanita Setjen BPK pada saat Bazar Ramadhan 2019, 27 Mei 2019.



Majalah Warta Pemeriksa
edisi 7/Vol 1 - Juli 2018
mendapat penghargaan
BRONZE WINNER
PR Indonesia Awards 2019
untuk Kategori
Media Cetak
Sub Kategori Lembaga



www.bpk.go.id

BPK RI Official

@humasbpkri.official

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

@bpkri

@bpkriofficial

Tugas BPK BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.